



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Jend. A. Yani No.100 Tanjungpandan Belitung Kode Pos 33412
Telp. (0719) 9223136 FAX (0719) 9223136
Email : dpppasbelitung@gmail.com Website : dpppas.belitungkab.go.id

Tanjungpandan, 30 September 2024

Kepada

Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Belitung

di –

Tanjungpandan

SURAT PENGANTAR
Nomor : 050/521/DSPPPA

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2025.	1 (satu) berkas.	Disampaikan dengan hormat untuk proses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Dinas,

KASIMIN, S.IP, MAB
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 196908241990031004

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG**



TANJUNGPANDAN, JULI 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2025 dapat terlaksana.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas tahunan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dalam Rancangan Akhir Renja ini juga mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026.

Harapan kami semoga Renja ini bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tanjungpandan, 31 Juli 2024

Kepala Dinas,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
 Bab I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	 56
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	57
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	75
 Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 76
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	76
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	77
 Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 97
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	97
 Bab V PENUTUP	 98

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	56
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	57
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	75
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	76
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	76
3.2. Tujuan dan Sasaran Berja Perangkat Daerah	77
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	97
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Bab V PENUTUP	98

DAFTAR PENDAFTARAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Betitung sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikator yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renja, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengkhliaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 10 Seri E);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
33. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026;
34. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026;
35. Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 - 2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk

1. Menyelaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD tahun 2025
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana kerja Anggaran (RKA)
3. Menjadi kitabeka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanan
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah tahun ke 2.

Pencapaian pada tahun (n-2) merupakan Pencapaian Rencana Strategis Periode Renstra Tahun 2019 - 2023. Berikut pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat daerah disajikan dalam tabel di bawah ini.

[illegible]

Project Name	Project ID	Project Type	Project Status	Project Manager	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (USD)	Project Actual Cost (USD)	Project Variance (USD)	Project ROI (%)	Project Risk Level	Project Completion Date	Project Overall Rating	Project Notes
Project A	001	Software Development	Completed	John Doe	2023-01-01	2023-03-31	100,000	95,000	5,000	5%	Low	2023-03-31	4.5	Project A completed successfully with a 5% variance.
Project B	002	Hardware Upgrade	In Progress	Jane Smith	2023-02-01	2023-04-30	150,000	140,000	10,000	6.7%	Medium	2023-04-30	4.0	Project B is currently in progress and on track.
Project C	003	Cloud Migration	On Hold	Mike Johnson	2023-03-01	2023-05-31	200,000	210,000	-10,000	-5%	High	2023-05-31	3.5	Project C is currently on hold due to budget constraints.
Project D	004	Marketing Campaign	Completed	Sarah Lee	2023-01-15	2023-02-28	50,000	48,000	2,000	4%	Low	2023-02-28	4.8	Project D completed successfully with a 4% variance.
Project E	005	IT Infrastructure Upgrade	In Progress	David Brown	2023-04-01	2023-06-30	300,000	290,000	10,000	3.3%	Medium	2023-06-30	4.2	Project E is currently in progress and on track.
Project F	006	Customer Portal Development	On Hold	Emily White	2023-05-01	2023-07-31	180,000	190,000	-10,000	-5.6%	High	2023-07-31	3.0	Project F is currently on hold due to resource allocation.
Project G	007	Security Audit	Completed	Robert Green	2023-02-15	2023-03-15	75,000	72,000	3,000	4%	Low	2023-03-15	4.7	Project G completed successfully with a 4% variance.
Project H	008	Mobile App Development	In Progress	Lisa Black	2023-03-15	2023-05-15	120,000	115,000	5,000	4.2%	Medium	2023-05-15	4.1	Project H is currently in progress and on track.
Project I	009	Website Redesign	On Hold	Kevin Gray	2023-04-15	2023-06-15	90,000	95,000	-5,000	-5.6%	High	2023-06-15	3.2	Project I is currently on hold due to design changes.
Project J	010	Internal Tool Development	Completed	Amanda Pink	2023-01-01	2023-02-28	60,000	58,000	2,000	3.3%	Low	2023-02-28	4.6	Project J completed successfully with a 3.3% variance.
Project K	011	Hardware Refresh	In Progress	Chris Blue	2023-05-01	2023-07-31	250,000	240,000	10,000	4%	Medium	2023-07-31	4.3	Project K is currently in progress and on track.
Project L	012	Cloud Storage Migration	On Hold	Michelle Yellow	2023-06-01	2023-08-31	170,000	180,000	-10,000	-5.9%	High	2023-08-31	3.1	Project L is currently on hold due to data migration issues.
Project M	013	Security Patch Deployment	Completed	James Purple	2023-02-01	2023-02-28	40,000	39,000	1,000	2.5%	Low	2023-02-28	4.9	Project M completed successfully with a 2.5% variance.
Project N	014	Mobile App Testing	In Progress	Olivia Brown	2023-03-01	2023-04-30	80,000	78,000	2,000	2.5%	Medium	2023-04-30	4.4	Project N is currently in progress and on track.
Project O	015	Website Performance Optimization	On Hold	Benjamin Green	2023-04-01	2023-06-30	110,000	115,000	-5,000	-4.5%	High	2023-06-30	3.3	Project O is currently on hold due to performance issues.
Project P	016	Internal Tool Integration	Completed	Sophia Blue	2023-01-15	2023-03-15	70,000	68,000	2,000	2.9%	Low	2023-03-15	4.7	Project P completed successfully with a 2.9% variance.
Project Q	017	Hardware Upgrade	In Progress	Lucas Yellow	2023-05-15	2023-07-15	220,000	210,000	10,000	4.5%	Medium	2023-07-15	4.2	Project Q is currently in progress and on track.
Project R	018	Cloud Migration	On Hold	Isabella Purple	2023-06-15	2023-08-15	190,000	200,000	-10,000	-5.3%	High	2023-08-15	3.0	Project R is currently on hold due to migration challenges.
Project S	019	Security Audit	Completed	Ethan Brown	2023-02-15	2023-03-15	70,000	68,000	2,000	2.9%	Low	2023-03-15	4.8	Project S completed successfully with a 2.9% variance.
Project T	020	Mobile App Development	In Progress	Aria Green	2023-03-15	2023-05-15	130,000	125,000	5,000	3.8%	Medium	2023-05-15	4.1	Project T is currently in progress and on track.
Project U	021	Website Redesign	On Hold	Leo Blue	2023-04-15	2023-06-15	100,000	105,000	-5,000	-5%	High	2023-06-15	3.2	Project U is currently on hold due to design changes.
Project V	022	Internal Tool Development	Completed	Mia Yellow	2023-01-01	2023-02-28	60,000	58,000	2,000	3.3%	Low	2023-02-28	4.6	Project V completed successfully with a 3.3% variance.
Project W	023	Hardware Refresh	In Progress	Noah Purple	2023-05-01	2023-07-31								

No.	Name of the Company	Sector	Type of Investment	Amount (USD)	Date of Investment	Status	Financial Data (USD)				Performance Data (%)			
							Revenue	Profit	Assets	Liabilities	Revenue	Profit	Assets	Liabilities
1	ABC Corporation	Technology	Equity	1000000	2023-01-15	Active	1200000	150000	800000	200000	15%	20%	10%	5%
2	XYZ Limited	Manufacturing	Debt	500000	2023-03-20	Active	600000	75000	400000	125000	12%	18%	8%	3%
3	DEF Inc.	Healthcare	Equity	750000	2023-05-10	Active	850000	100000	600000	250000	18%	22%	12%	7%
4	GHI Partners	Finance	Debt	300000	2023-07-05	Active	350000	40000	250000	100000	10%	15%	6%	2%
5	JKL Group	Energy	Equity	1500000	2023-09-18	Active	1600000	200000	1000000	600000	25%	30%	15%	10%
6	MNO Enterprises	Telecommunications	Debt	800000	2023-11-02	Active	900000	110000	650000	250000	14%	19%	9%	4%
7	PQR Solutions	Software	Equity	600000	2024-01-10	Active	700000	80000	500000	200000	16%	21%	11%	6%
8	STU Corporation	Automotive	Debt	400000	2024-03-15	Active	450000	50000	300000	150000	11%	16%	7%	3%
9	VWX Limited	Food & Beverage	Equity	900000	2024-05-20	Active	1000000	120000	700000	300000	20%	24%	13%	8%
10	YZA Inc.	Real Estate	Debt	200000	2024-07-25	Active	220000	25000	150000	70000	9%	13%	5%	2%

Project Name	Project Description	Project Type	Project Status	Project Manager	Financial Data										Total			
					Revenue	Cost	Profit	Margin	ROI	NPV	IRR	Payback	Break-Even	NPV	IRR			
Project A	Project A Description	Project A Type	Project A Status	Project A Manager	100	50	50	50%	10%	100	50	50	50%	10%	100	50	50%	10%
Project B	Project B Description	Project B Type	Project B Status	Project B Manager	200	100	100	50%	10%	200	100	100	50%	10%	200	100	50%	10%
Project C	Project C Description	Project C Type	Project C Status	Project C Manager	300	150	150	50%	10%	300	150	150	50%	10%	300	150	50%	10%
Project D	Project D Description	Project D Type	Project D Status	Project D Manager	400	200	200	50%	10%	400	200	200	50%	10%	400	200	50%	10%
Project E	Project E Description	Project E Type	Project E Status	Project E Manager	500	250	250	50%	10%	500	250	250	50%	10%	500	250	50%	10%
Project F	Project F Description	Project F Type	Project F Status	Project F Manager	600	300	300	50%	10%	600	300	300	50%	10%	600	300	50%	10%
Project G	Project G Description	Project G Type	Project G Status	Project G Manager	700	350	350	50%	10%	700	350	350	50%	10%	700	350	50%	10%
Project H	Project H Description	Project H Type	Project H Status	Project H Manager	800	400	400	50%	10%	800	400	400	50%	10%	800	400	50%	10%
Project I	Project I Description	Project I Type	Project I Status	Project I Manager	900	450	450	50%	10%	900	450	450	50%	10%	900	450	50%	10%
Project J	Project J Description	Project J Type	Project J Status	Project J Manager	1000	500	500	50%	10%	1000	500	500	50%	10%	1000	500	50%	10%

Project Name		Project ID	Project Type	Project Status	Project Manager	Project Budget	Project Cost	Project Profit	Project Margin	Project ROI	Project NPV	Project IRR	Project Payback	Project Break-Even	Project Risk	Project Sensitivity	Project Scenario	Project Assumptions	Project Notes
Project A	Project A Description	1001	Project A Type	Project A Status	Project A Manager	Project A Budget	Project A Cost	Project A Profit	Project A Margin	Project A ROI	Project A NPV	Project A IRR	Project A Payback	Project A Break-Even	Project A Risk	Project A Sensitivity	Project A Scenario	Project A Assumptions	Project A Notes
Project B	Project B Description	1002	Project B Type	Project B Status	Project B Manager	Project B Budget	Project B Cost	Project B Profit	Project B Margin	Project B ROI	Project B NPV	Project B IRR	Project B Payback	Project B Break-Even	Project B Risk	Project B Sensitivity	Project B Scenario	Project B Assumptions	Project B Notes
Project C	Project C Description	1003	Project C Type	Project C Status	Project C Manager	Project C Budget	Project C Cost	Project C Profit	Project C Margin	Project C ROI	Project C NPV	Project C IRR	Project C Payback	Project C Break-Even	Project C Risk	Project C Sensitivity	Project C Scenario	Project C Assumptions	Project C Notes
Project D	Project D Description	1004	Project D Type	Project D Status	Project D Manager	Project D Budget	Project D Cost	Project D Profit	Project D Margin	Project D ROI	Project D NPV	Project D IRR	Project D Payback	Project D Break-Even	Project D Risk	Project D Sensitivity	Project D Scenario	Project D Assumptions	Project D Notes
Project E	Project E Description	1005	Project E Type	Project E Status	Project E Manager	Project E Budget	Project E Cost	Project E Profit	Project E Margin	Project E ROI	Project E NPV	Project E IRR	Project E Payback	Project E Break-Even	Project E Risk	Project E Sensitivity	Project E Scenario	Project E Assumptions	Project E Notes
Project F	Project F Description	1006	Project F Type	Project F Status	Project F Manager	Project F Budget	Project F Cost	Project F Profit	Project F Margin	Project F ROI	Project F NPV	Project F IRR	Project F Payback	Project F Break-Even	Project F Risk	Project F Sensitivity	Project F Scenario	Project F Assumptions	Project F Notes
Project G	Project G Description	1007	Project G Type	Project G Status	Project G Manager	Project G Budget	Project G Cost	Project G Profit	Project G Margin	Project G ROI	Project G NPV	Project G IRR	Project G Payback	Project G Break-Even	Project G Risk	Project G Sensitivity	Project G Scenario	Project G Assumptions	Project G Notes
Project H	Project H Description	1008	Project H Type	Project H Status	Project H Manager	Project H Budget	Project H Cost	Project H Profit	Project H Margin	Project H ROI	Project H NPV	Project H IRR	Project H Payback	Project H Break-Even	Project H Risk	Project H Sensitivity	Project H Scenario	Project H Assumptions	Project H Notes
Project I	Project I Description	1009	Project I Type	Project I Status	Project I Manager	Project I Budget	Project I Cost	Project I Profit	Project I Margin	Project I ROI	Project I NPV	Project I IRR	Project I Payback	Project I Break-Even	Project I Risk	Project I Sensitivity	Project I Scenario	Project I Assumptions	Project I Notes
Project J	Project J Description	1010	Project J Type	Project J Status	Project J Manager	Project J Budget	Project J Cost	Project J Profit	Project J Margin	Project J ROI	Project J NPV	Project J IRR	Project J Payback	Project J Break-Even	Project J Risk	Project J Sensitivity	Project J Scenario	Project J Assumptions	Project J Notes
Project K	Project K Description	1011	Project K Type	Project K Status	Project K Manager	Project K Budget	Project K Cost	Project K Profit	Project K Margin	Project K ROI	Project K NPV	Project K IRR	Project K Payback	Project K Break-Even	Project K Risk	Project K Sensitivity	Project K Scenario	Project K Assumptions	Project K Notes
Project L	Project L Description	1012	Project L Type	Project L Status	Project L Manager	Project L Budget	Project L Cost	Project L Profit	Project L Margin	Project L ROI	Project L NPV	Project L IRR	Project L Payback	Project L Break-Even	Project L Risk	Project L Sensitivity	Project L Scenario	Project L Assumptions	Project L Notes
Project M	Project M Description	1013	Project M Type	Project M Status	Project M Manager	Project M Budget	Project M Cost	Project M Profit	Project M Margin	Project M ROI	Project M NPV	Project M IRR	Project M Payback	Project M Break-Even	Project M Risk	Project M Sensitivity	Project M Scenario	Project M Assumptions	Project M Notes
Project N	Project N Description	1014	Project N Type	Project N Status	Project N Manager	Project N Budget	Project N Cost	Project N Profit	Project N Margin	Project N ROI	Project N NPV	Project N IRR	Project N Payback	Project N Break-Even	Project N Risk	Project N Sensitivity	Project N Scenario	Project N Assumptions	Project N Notes
Project O	Project O Description	1015	Project O Type	Project O Status	Project O Manager	Project O Budget	Project O Cost	Project O Profit	Project O Margin	Project O ROI	Project O NPV	Project O IRR	Project O Payback	Project O Break-Even	Project O Risk	Project O Sensitivity	Project O Scenario	Project O Assumptions	Project O Notes
Project P	Project P Description	1016	Project P Type	Project P Status	Project P Manager	Project P Budget	Project P Cost	Project P Profit	Project P Margin	Project P ROI	Project P NPV	Project P IRR	Project P Payback	Project P Break-Even	Project P Risk	Project P Sensitivity	Project P Scenario	Project P Assumptions	Project P Notes
Project Q	Project Q Description	1017	Project Q Type	Project Q Status	Project Q Manager	Project Q Budget	Project Q Cost	Project Q Profit	Project Q Margin	Project Q ROI	Project Q NPV	Project Q IRR	Project Q Payback	Project Q Break-Even	Project Q Risk	Project Q Sensitivity	Project Q Scenario	Project Q Assumptions	Project Q Notes
Project R	Project R Description	1018	Project R Type	Project R Status	Project R Manager	Project R Budget	Project R Cost	Project R Profit	Project R Margin	Project R ROI	Project R NPV	Project R IRR	Project R Payback	Project R Break-Even	Project R Risk	Project R Sensitivity	Project R Scenario	Project R Assumptions	Project R Notes
Project S	Project S Description	1019	Project S Type	Project S Status	Project S Manager	Project S Budget	Project S Cost	Project S Profit	Project S Margin	Project S ROI	Project S NPV	Project S IRR	Project S Payback	Project S Break-Even	Project S Risk	Project S Sensitivity	Project S Scenario	Project S Assumptions	Project S Notes
Project T	Project T Description	1020	Project T Type	Project T Status	Project T Manager	Project T Budget	Project T Cost	Project T Profit	Project T Margin	Project T ROI	Project T NPV	Project T IRR	Project T Payback	Project T Break-Even	Project T Risk	Project T Sensitivity	Project T Scenario	Project T Assumptions	Project T Notes
Project U																			

Nama :	
No. :	
Kelas :	
Materi :	
Tgl. :	



No	Kategori	Nilai	Penilaian
1	80% - 100%	100	100
2	70% - 79%	80	80
3	60% - 69%	60	60
4	50% - 59%	40	40
5	40% - 49%	20	20

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2023 Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial tahun 2023 sebesar 38,60% di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase ini didapatkan dari rumus jumlah penerima program pemberdayaan sosial 7535 KK (Data BPNT) dibagi jumlah penduduk miskin 19.519 KK (Data DTKS) dalam dikali 100 persen. Bisa diartikan hanya 38,60 persen dari jumlah penduduk miskin yang dibantu dengan program BPNT yang merupakan program dan kuota bantuan dari Pusat. Program ini didukung oleh Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota.

Faktor pendukung dari Program/ Kegiatan ini yaitu adanya Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat.

Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya Data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana.

Solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan Indikator Terpekerjanya perlindungan dan jaminan sosial tahun 2023 sebesar 88,31% dari target 100%. Indikator program ini di dapat dari rumusan jumlah penerima perlindungan dan jaminan sosial yang berasal dari data PDI berjumlah 40652 dibagi jumlah jiwa dalam DTKS berjumlah 46032 dikali 100%.

Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Data Eakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi. Outcome kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat.

Faktor pendorong : Sistem informasi (SIKS-NG) yang cukup memadai;

Faktor penghambat : masih adanya PSM yang tidak aktif dalam melakukan verifikasi ketidaklayakan dan pemadanan dukcapil, masih adanya petugas pengisi data desa/ kelurahan yang terkendala dalam mengakses sistem SIKS-NG dikarenakan tidak memiliki laptop, belum adanya anggaran dalam peningkatan kapasitas PSM/ Pengisi data Desa/ Kelurahan.

Terdapat Realisasi Program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/ melebihi target kinerja program/Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan indikator

Persentase ARG pada belanja langsung APBD;

Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2023 yaitu 48,48% diatas target sebesar 0,5%. Nilai diperoleh dari rumusan jumlah anggaran yang responsive gender seluruh Perangkat Daerah Rp 536.418.493.812,- dibagi jumlah anggaran Belanja Langsung APBD (terdiri dari belanja Operasional dan Belanja Modal) Rp. 1.106.527.840.359,- dikali 100%. Jika dibandingkan dengan target, persentase realisasi pencapaian indikator ini meningkat sebesar 6,03% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai persentase ARG 42,40% (Indikator outcome pada laporan LPPD). Hal ini dikarenakan dampak dari dilaksanakan Bimtek PPRG pada Bulan Oktober tahun 2023 dengan narasumber dari Kementerian PPA yang pesertanya adalah Perencana OPD baru dipahamai kegiatan/ sub kegiatan yang termasuk ARG pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah. Semua kegiatan yang tidak merujuk salah satu jenis kelamin adalah ARG.

2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator

Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) tahun 2023 sebesar 75% lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu 25%. Capaian indikator ini didapat dari Komponen data gender dan anak yang terpenuhi dibagi jumlah komponen data SIGA dikali 100%. Dari 60 komponen data SIGA sudah 45 komponen yang terpenuhi atau sekitar 75% Faktor penghambat, adanya OPD yang belum memahami tentang pentingnya data gender dan anak, sehingga diperlukan Bimtek atau pelatihan-pelatihan khusus mengenai Pemenuhan Sistem Informasi Gender dan Anak.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA), dengan indikator Status Kabupaten Layak Anak (KLA). Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama tahun 2023 meningkat dari 2022 yaitu dari Status Pratama menjadi Madya. Faktor pendorong KLA antara lain adalah meningkatnya antusias daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan ehsan bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA. Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 cluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun pada Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Helling Tahun 2018 - 2023. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Helling Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebagaimana tabel 2.2. berikut :

Tabel. 2.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Target					Realisasi					Persentase Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
				2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022		2023	2020	2021
1.1. Tujuan Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,93	-5,01	-8,79	0,96	18,39	-1002	-1758	192	3678	
1.2. Sasaran Meningkatnya penanganan PMKS yang tertangani	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	73,85	80	80	80	80	80	83,89	94,78	97,69	98,79	98,29	104,86	118,48	123,11	123,49	122,85
2.1. Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,27	42,62	43,91	45,11	46,35	47	43,07	53,11	53,02	53,02	53,42	101,06	117,53	114,39	113,66	
2.2. Sasaran Meningkatnya Kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	-	7,89	5,7	5,5	5,3	5,1	8,17	3,09	4,13	3,28	5,25	103,55	54,21	79,09	61,89	102,54
3.1. Tujuan Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	70	75	80	83	Pratama (85%)	60,9	60,9	58,37	58,15	Madhya	87	81,2	72,96	70,06	117,84
3.2. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	-	5	4,8	4,6	4,4	-	2,84	1,61	9,5	7,49	12,97	56,8	37,71	208,52	294,77
																	Indikator Negatif

Demikian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja yakni :

- Indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dengan capaian 5,25 dari target 5,1. Indikator ini merupakan indikator negatif dimana perempuan korban tindak kekerasan melebihi target dan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 30 orang menjadi 49 orang di tahun 2023.
- Indikator prevalensi kekerasan anak dengan capaian 12,97 jauh di atas target 4,4 di tahun 2022. Target ini merupakan target negatif, dimana target ini melebihi dari target yang ditetapkan. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 50 orang menjadi 74 orang di tahun 2023, namun dikarenakan ini merupakan indikator negatif, jadi secara kinerja belum tercapai dengan baik.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang melebihi target yaitu :

- Indikator persentase penurunan PMKS per tahun dengan capaian 18,39 dari target 0,5. Terdapat penurunan jumlah PMKS dari tahun sebelumnya.
- Indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan capaian 98,29% dari target 80%. Indikator ini memuat dari jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS keseluruhan (26 jenis PMKS) dikali 100%.
- Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IDG tahun 2023 masih menggunakan nilai IDG tahun 2022 yaitu 53,42 dari target 47, dikarenakan untuk nilai IDG tahun 2023 belum rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS)
- Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dari status KLA pratama menjadi KLA Madya.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong dikaji berdasarkan capaian kinerja pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat terlihat pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencstra SKPD Tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke (%)					Rasio Pencapaian tahun ke (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penurunan PMKS per tahun				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-5,93	4,92	-8,79	0,75	18,39	-	584	-	152	3678
2	Persentase PMKS yang terlanjani				60	60	60	60	60	63,69	94,20	97,69	98,80	98,29	104,86	117,75	122,11	123,50	122,88
3	Persentase PMKS yang menerima program						100	100	100			41,72	42,14	38,60			41,72	42,14	38,60
4	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	100					100	100	100			100	100	100			100	100	100
5	Terpenuhiya perlindungan dan jaminan sosial						100	100	100			83,01	97,25	88,31			83,01	97,25	88,31
6	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100					100	100	100			100	100	100			100	100	100
7	Taman Makam Pahlawan yang terata						90	100	100			90	100	100			100	100	100
8	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan						100	100	100			100	100	100			100	100	100
9	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah						75	75	75			73,33	78,70	78,80			97,77	104,93	104,93
10	Persentase pelayanan administrasi perkantoran						100	100	100			100	100	100			100	100	100
11	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100	100	100			100	100	100			100	100	100

12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					42,8 2	43,9 1	45,1 1	46,3 5	47,00	43,0 7	53,1 1	53,0 2	53,0 2	53,4 2	102,53	120,95	117,53	117,53	113,66
13	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan																			
14	Persentase ARG pada belanja langsung APBD						5,70	5,50	5,30	5,10		2,85	4,13	3,73	5,25		50	75,0 9	70,3 8	102,94
15	Persentase layanan perlindungan perempuan																			
16	Persentase keluarga yang terlayani																			
17	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)																			
18	Kabupaten Layak Anak (KLA)																			
19	Prevalensi kekerasan terhadap anak																			
20	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)																			
21	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten																			

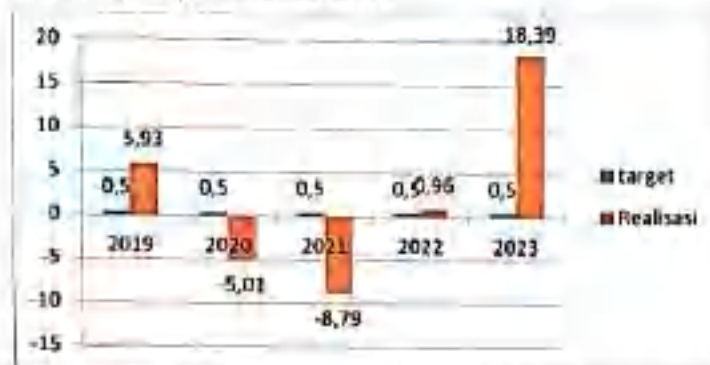
Berdasarkan tabel 2.3, Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas dapat diketahui bahwa :

- Indikator kinerja yang dipakai yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga Indikator kinerja Program.
- Dari tabel di atas dapat kita lihat secara garis besar sudah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target.

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1) **Persentase penurunan PMKS per tahun**

Perkembangan realisasi persentase penurunan PMKS per Tahun untuk tahun 2019-2023 disajikan pada gambar 3.1 berikut :



Grafik 2.1 Target dan realisasi persentase penurunan PMKS per tahun

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran "Persentase penurunan jumlah PMKS" dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, nilai minus disini dimaksudkan PMKS tidak mengalami penurunan pertahunnya (jumlah PMKS meningkat) dan nilai positif dimaksudkan menurunnya jumlah PMKS dari tahun sebelumnya. Untuk jumlah PMKS tahun 2021 sebesar 14.829 (meningkat dari tahun sebelumnya), dan tahun 2022 jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya yaitu 14.686 dan Tahun 2023 jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 11.986 Orang.

Jika dimasukkan dalam rumusan yang telah ditetapkan dalam IKU Perubahan Tahun 2018-2023 yaitu $(\text{Jumlah PMKS tahun } n-1 - \text{Jumlah PMKS tahun } n) / \text{Jumlah PMKS tahun } n-1 \times 100\%$. Maka didapatkan nilai minus 8,79 untuk tahun 2021, nilai positif 0,96 ditahun 2022, dan positif 18,39 tahun 2023.

Terjadinya peningkatan jumlah PMKS di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya dampak pandemi Covid sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah PMKS terutama untuk fakir miskin. Seiring dengan meredanya dampak pandemi covid di tahun 2022 dan tahun 2023

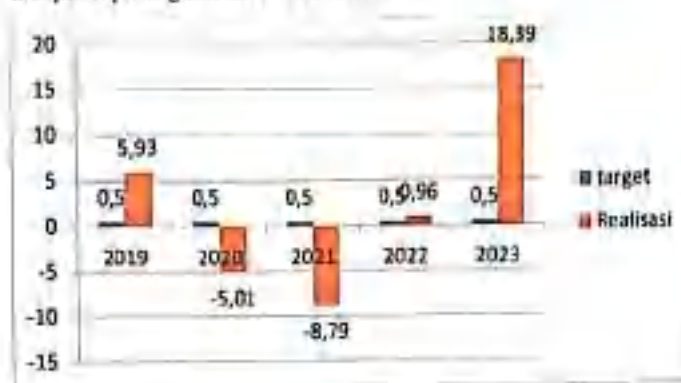
Berdasarkan tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas dapat diketahui bahwa :

- Indikator kinerja yang dipakai yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga indikator kinerja Program.
- Dari tabel di atas dapat kita lihat secara garis besar sudah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target.

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1) Persentase penurunan PMKS per tahun

Perkembangan realisasi persentase penurunan PMKS per Tahun untuk tahun 2019-2023 disajikan pada gambar 3.1 berikut :



Grafik 2.1 Target dan realisasi persentase penurunan PMKS per tahun

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran “Persentase penurunan jumlah PMKS” dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, nilai minus disini dimaksudkan PMKS tidak mengalami penurunan pertahunnya (jumlah PMKS meningkat) dan nilai positif dimaksudkan menurunnya jumlah PMKS dari tahun sebelumnya. Untuk jumlah PMKS tahun 2021 sebesar 14.829 (meningkat dari tahun sebelumnya), dan tahun 2022 jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya yaitu 14.686 dan Tahun 2023 jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 11.986 Orang.

Jika dimasukkan dalam rumusan yang telah ditetapkan dalam IKU Perubahan Tahun 2018-2023 yaitu $(\text{Jumlah PMKS tahun } n-1 - \text{Jumlah PMKS tahun } n) / \text{Jumlah PMKS tahun } n-1 \times 100\%$. Maka didapatkan nilai minus 8,79 untuk tahun 2021, nilai positif 0,96 ditahun 2022, dan positif 18,39 tahun 2023.

Terjadinya peningkatan jumlah PMKS di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya dampak pandemi Covid sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah PMKS terutama untuk fakir miskin. Seiring dengan meredanya dampak pandemi covid di tahun 2022 dan tahun 2023

terjadi penurunan jumlah PMKS, hal ini juga tentunya tidak terlepas dari fokus dan anggaran penanganan PMKS di Kabupaten Belitung terutama dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penanganan PMKS.

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya respon yang baik dari masyarakat Belitung terhadap penanganan PMKS, terjalinnya Sinergitas antar instansi dalam penanganan PMKS, adanya SDM yang kompeten di bidang sosial, dan tersedianya anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya data PMKS belum valid, masih ada beberapa SDM yang belum memiliki kompetensi di bidang sosial, masih terjadinya ego sektoral di berbagai lini, dan masih ada beberapa sub kegiatan yang memiliki anggaran terbatas. Dan solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, perlunya peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial, menjalin sinergitas dengan berbagai pihak, penambahan anggaran, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Pencapaian Tujuan pertama ini juga didukung oleh Sasaran Pertama yaitu Meningkatnya penanganan PMKS dengan indikator persentase PMKS yang tertangani.

2) Persentase PMKS yang tertangani

Untuk mengukur kualitas meningkatnya penanganan PMKS pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator yaitu Persentase PMKS yang tertangani.

Pada indikator ini pengukuran yang dilakukan adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

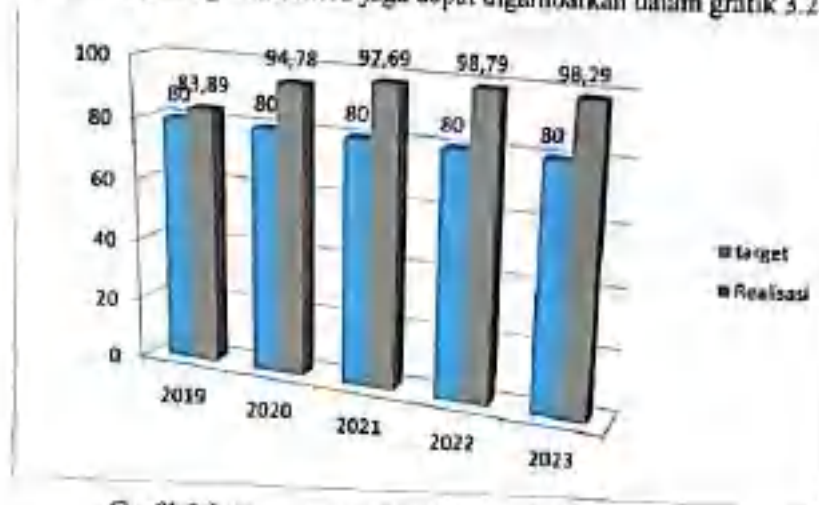
Tabel 2.4
Pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS

Tahun	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	%
2019	14.337	12.028	83,89
2020	13.631	12.841	94,20
2021	14.829	14.487	97,69
2022	14.685	14.509	98,79
2023	11.986	11.781	98,29

Pada tabel 3.14, di atas dapat dilihat bahwa dari pelayanan dan penanganan PMKS dalam 3 tahun terakhir meningkat persentasenya.

Jumlah PMKS pada tahun 2020 menurun yaitu 13.631 orang yang memperoleh bantuan sosial menjadi 12.841 dari sebelumnya 14.337 orang atau sebesar 94,20%. Dan ditahun 2021 jumlah PMKS kembali meningkat sebesar 14.829 dan jumlah tertangani sebesar 14.487 dengan persentase meningkat penanganan PMKS meningkat 3,49% menjadi 97,69%. Tahun 2022 jumlah PMKS kembali menurun sebesar 14.685 dan jumlah tertangani sebesar 14.509 dengan persentase penanganan PMKS meningkat 1,1% dari tahun sebelumnya menjadi 98,79%. Dan Tahun 2023 jumlah PMKS menurun menjadi 11.986 dan jumlah tertangani sebesar 11.781 dengan persentase penanganan 98,29%. Persentase penanganan PMKS menurun 0,5% dari tahun sebelumnya namun masih melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu 80%.

Persentase penanganan PMKS juga dapat digambarkan dalam grafik 3.2. berikut ini :



Grafik 2.2. Penanganan PMKS tahun 2019 - 2023

Jumlah dan Jenis PMKS selama 5 tahun Renstra (2019 - 2023) terdapat dalam tabel 3.1 S. berikut :

Tabel 2.5. Jumlah dan Jenis Penanganan PJKS Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Penyakit	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Jumlah PJKS	Jumlah PJKS yang ditangani	Perawatan awal (\$)	Jumlah PJKS yang ditangani	Perawatan awal (\$)	Jumlah PJKS yang ditangani	Perawatan awal (\$)	Jumlah PJKS yang ditangani	Perawatan awal (\$)	Jumlah PJKS yang ditangani	Perawatan awal (\$)	Jumlah PJKS yang ditangani	Perawatan awal (\$)		
1	Asuk Baku Terpapar	1	1	100,00	0	0	0,00	21	21	100,00	72	22	100,00	2	2	100,00
2	Asuk Terpapar	244	329	52,87	244	59,02	219	219	100,00	36	36	100,00	15	15	100,00	
3	Asuk yang berakut dalam dengan HIV/AM	20	20	100,00	6	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00	4	4	100,00	
4	Asuk Malaria	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
5	Asuk dengan Disabilitas	43	10	23,26	43	23,26	32	32	32,43	37	37	100,00	27	22	38,60	
6	Asuk yang menjadi korban UHUK, kelainan atau diperlakukan salah	21	21	100,00	9	100,00	10	10	100,00	8	8	100,00	13	13	100,00	
7	Asuk yang memberikan perlindungan Mayoritas	1	1	100,00	0	100,00	15	15	100,00	50	50	100,00	13	15	100,00	
8	Kanker Uterus Terpapar	1183	1084	98,21	3163	83,30	1163	1163	100,00	1154	1154	100,00	60	60	100,00	
9	Perempuan Disabilitas (PJKS)	705	134	19,00	812	20,42	612	295	48,38	612	415	71,09	632	475	75,16	
9.a	Pengandung Disabilitas Terpapar												30	30		
10	Tumor Susta	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
11	Gondongan	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	39	39	-	
12	Pengam	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
13	Pemadung	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	

Tabel 2.5. Jumlah dan Jenis Penanganan PMKS Tahun 2019 – 2023

No	Jenis PMKS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)
1.	Anak Balita Terlantar	1	1	100,00	0	0	0,00	71	71	100,00	71	71	100,00	2	2	100,00
2.	Anak Terlantar	244	129	52,87	244	144	59,02	219	219	100,00	86	86	100,00	15	15	100,00
3.	Anak yang berhadapan dengan Hukum	20	20	100,00	6	6	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00	4	4	100,00
4.	Anak Jalanan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Anak dengan Disabilitas	43	30	23,26	43	30	23,26	37	32	32,43	37	37	100,00	57	22	38,60
6.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	21	21	100,00	9	9	100,00	30	30	100,00	8	8	100,00	13	13	100,00
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	1	100,00	6	6	100,00	15	15	100,00	50	50	100,00	13	13	100,00
8.	Lain-lain Usia Terlantar	1163	3084	93,21	1163	993	85,36	1163	1163	100,00	1154	1154	100,00	60	60	100,00
9.	Penyandang Disabilitas (PACA)	705	134	19,01	612	125	20,42	612	255	41,30	612	435	71,08	632	475	75,16
9.a	Penyandang Disabilitas Terlantar													30	30	
10.	Tuna Susia	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
11.	Gelandangan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	39	39	-
12.	Pengemis	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
13.	Pemulung	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

No	Jenis PHKS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Jumlah PHKS yang dilaporkan	Persentase (%)	Jumlah PHKS yang dilaporkan	Persentase (%)	Jumlah PHKS yang dilaporkan	Persentase (%)	Jumlah PHKS yang dilaporkan	Persentase (%)	Jumlah PHKS yang dilaporkan	Jumlah PHKS yang dilaporkan	Persentase (%)	Jumlah PHKS yang dilaporkan	Jumlah PHKS yang dilaporkan	Persentase (%)	Persentase (%)
14	Kelompok Masyarakat	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	48	100,00	15	100,00	16	100,00	16	100,00	16	15	100,00	16	14	100,00	100,00
17	Korban Penyimpangan NAPZA	0	100,00	4	100,00	5	100,00	5	100,00	4	4	100,00	14	1	7,14	7,14
18	Korban Trafficking	2	100,00	0	100,00	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	-
19	Korban Tindak Ekstrem	44	100,00	28	100,00	40	100,00	40	100,00	32	32	100,00	54	51	100,00	100,00
20	Pekerja Asongan Barmasialah Sosial (PMBS)	18	100,00	18	100,00	12	100,00	12	100,00	23	23	100,00	0	0	100,00	100,00
21	Korban Bencana Alam	384	100,00	21	100,00	32	100,00	32	100,00	14	13	100,00	13	15	100,00	100,00
22	Korban Bencana Sosial	36	100,00	0	100,00	17	100,00	17	100,00	2	2	100,00	5	5	100,00	100,00
23	Pemangku Rukun Sosial Ekonomi	n/a	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	1056	100,00	1056	1096	100,00	3463	3463	100,00	100,00
24	Faktor Risiko	11603	86,98	11463	86,98	11463	86,98	11463	86,98	11463	11463	86,98	11463	11463	86,98	86,98
25	Keluarga Barmasialah Sosial Psikologis	0	0,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00	5	5	100,00	21	16	100,00	100,00
26	Komunitas Adat Terpencil	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	-
Jumlah		14337	83,49	13811	84,20	14829	87,69	14407	87,69	14086	14509	88,79	11505	11761	81,29	81,29

Adapun Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlibat dalam penanganan PMKS sebagai berikut :

TABEL 2.6
PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022		2023
						Lk	Pr	
1	TANJUNGPANDAN	3	4	4	4	-	4	4
2	MEMBALONG							
3	SIJUK							
4	BADAU							
5	SELAT NASIK							
	JUMLAH	3	4	4	4	-	4	4

TABEL 2.7
PENDAMPING PROGRAM KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	2023
1	TANJUNGPANDAN	12	16	15	14	14	14
2	MEMBALONG	5	5	4	4	4	4
3	SIJUK	3	3	3	3	3	3
4	BADAU	2	2	2	2	2	2
5	SELAT NASIK	2	2	2	2	2	2
	JUMLAH	29	28	26	25	25	25

TABEL 2.8
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	2023
1	TANJUNGPANDAN	15	16	16	16	16	13
2	MEMBALONG	12	12	12	12	12	12
3	SIJUK	10	10	10	10	10	10
4	BADAU	7	7	7	7	7	7
5	SELAT NASIK	4	4	4	4	4	4
	JUMLAH	49	48	48	49	49	46

TABEL 2.9
TARUNA SIAGA BENCANA

NO	KECAMATAN	2019	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	2023
1	TANJUNGPANDAN		38	38	37	37	37
2	MEMBALONG		0	0	0	0	0
3	SIJUK		4	3	3	3	3
4	BADAU		2	1	1	1	1
5	SELAT NASIK		4	4	4	4	4
	JUMLAH		48	46	45	45	45

TABEL 2.10
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

NO	KECAMATAN	2019	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	2023
1	TANJUNGPANDAN	3	5	5	5	5	5
2	MEMBALONG	0	0	0	0	0	0
3	SIJUK	0	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	5	5	5	5	5

TABEL 2.11
KARANG TARUNA

NO	KECAMATAN	2019	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	2023
1	TANJUNGPANDAN	18	18	18	18	18	18
2	MEMBALONG	13	13	13	13	13	13
3	SIJUK	11	11	11	11	11	11
4	BADAU	8	8	8	8	8	8
5	SELAT NASIK	5	5	5	5	5	5
	JUMLAH	55	55	55	55	55	55

TABEL 2.12
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022		2023
						Lk	Pt	
1	TANJUNGPANDAN	2	2	2	2	-	2	2
2	MEMBALONG	0	0	0	0	-	0	
3	SJUK	0	0	0	0	-	0	
4	BADAU	0	0	0	0	-	0	
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	-	0	
	JUMLAH	2	2	2	2	-	2	2

TABEL 2.13
KELUARGA PIONER

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	2023
1	TANJUNGPANDAN	0	0	0	0	0	0
2	MEMBALONG	0	0	0	0	0	0
3	SJUK	0	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0

TABEL 2.14
WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT (WKSBM)

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	2023
1	TANJUNGPANDAN	4	4	4	4	4	4
2	MEMBALONG	0	0	0	0	0	0
3	SJUK	0	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	4	4	4	4	4	4

TABEL 2.15
WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	2023
1	TANJUNGPANDAN	0	0	0	0	0	0
2	MEMBALONG	8	0	0	0	0	0
3	SIJUK	0	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0

TABEL 2.16
PENYULUH SOSIAL

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	2023
1	TANJUNGPANDAN	1	1	1	0	0	2
2	MEMBALONG	0	0	0	0	0	0
3	SIJUK	0	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	8	0	8
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1	1	1	0	0	0

TABEL 2.17
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022		2023
						Lk	Pr	
1	TANJUNGPANDAN	1	1	1	1	1	-	-
2	MEMBALONG	1	1	1	1	1	-	-
3	SIJUK	1	1	1	1	1	-	-
4	BADAU	1	1	1	1	1	-	-
5	SELAT NASIK	1	1	1	1	1	-	-
	JUMLAH	5	5	5	5	5	-	-

TABEL 2.18
DUNIA USAHA

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	2023
1	TANJUNGPANDAN	0	0	0	0	0	0
2	MEMBALONG	0	0	0	0	3	0
3	SIJUK	0	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0

Meningkatnya penurunan PMKS per tahun dan meningkatnya penanganan PMKS ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung fokus penanganan PMKS mendukung Suster Pelayan Miniatur, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis di luar pantai. Dengan meningkatnya pemberian bantuan tersebut dan fokus penanganan untuk pelayan SPK maka persentase penanganan PMKS meningkat melebihi target yang ditetapkan.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Perbaikan data layanan PMKS menjadi tepat sasaran
- 2) Peningkatan berbagai program/ kegiatan yang menyasar/ mengintervensi langsung kepada PMKS
- 3) Peningkatan Kerjasama lintas sektor. Kerjasama dengan Abiyoso Kemensos RI, Panti Bina Laras Belitung Timur, Pembangunan Rumah Singgah, dll.
- 4) Peningkatan kemampuan kompetensi PSKS, Karang Taruna, TKSK, PSM, dan lainnya.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh :

- 1) Adanya dukungan dana, Dana Insentif Daerah (DID), Fiskal, dll
- 2) Adanya pelaksanaan program hasil Kerjasama dengan Sentra Abiyoso, Kemensos RI.
- 3) Adanya peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan :

- 1) Meningkatkan SDM Pelayanan
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan
- 3) Meningkatkan layanan rujukan/menambah Kerjasama dengan lintas sektor/ perluasan Kerjasama.

3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

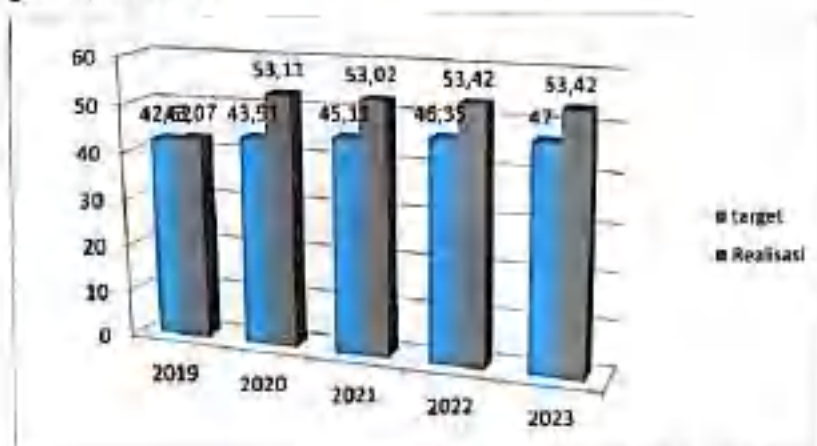
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 datanya belum tersedia baik di BPS maupun di Provinsi, untuk nilai tersebut tahun 2023 masih mengambil data IDG tahun sebelumnya yaitu 53,42. IDG ini diperoleh dari rumusan Persentase perempuan di parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis, yang datanya bersumber di BPS dan Profil Data Gender. Untuk tahun 2023, IDG masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan data belum rilis dari Badan Pusat Statistik.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.

Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai, serta perlunya koordinasi dengan BPS ataupun DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator ini merupakan indikator Tujuan yang kedua yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

Capaian kinerja selama lima tahun dari indikator ini dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :



Grafik 2.3. IDG Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan indikator IDG data 2023 belum muncul dari Badan Pusat Statistik.

Untuk mencapai tujuan ini, maka didukung oleh sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan.

4) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

Untuk mengukur kualitas hidup perempuan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio korban kekerasan perempuan yaitu dihitung dari Jumlah kekerasan perempuan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan > 18 tahun dikali 10.000. Nilai capaian indikator prevalensi ini mengalami peningkatan namun masih di bawah target (indikator negatif).

Tabel 2.19

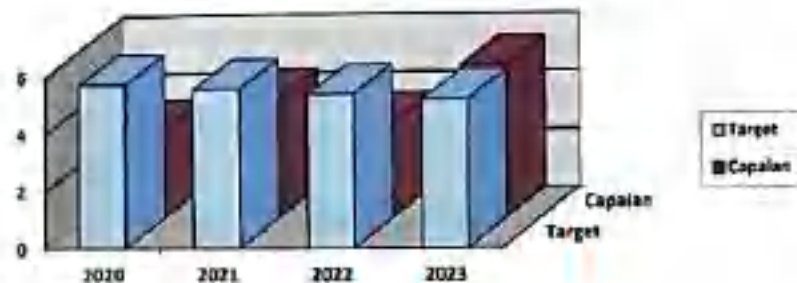
Rasio perempuan korban kekerasan terhadap perempuan tahun 2023

Tahun	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Penduduk Perempuan >18 tahun	Capaian dikali 10.000	Target Capaian
2020	27	87.296	3,09	5,7
2021	37	89.476	4,13	5,5
2022	30	91.366	3,28	5,3
2023	49	93.404	5,25	5,1

Pada tabel di atas dapat prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 sebesar 5,25 lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 5,1 dan ini merupakan indikator negatif. Pencapaian Angka kekerasan di Kabupaten Belitong Tahun 2022 dan 2023 masih diambang batas target. Prevalensi ini didapat dari rasio perempuan korban kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 10000. Jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2023 adalah 49 orang, meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah 30 orang. Prevalensi juga dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 2.4

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 – 2023



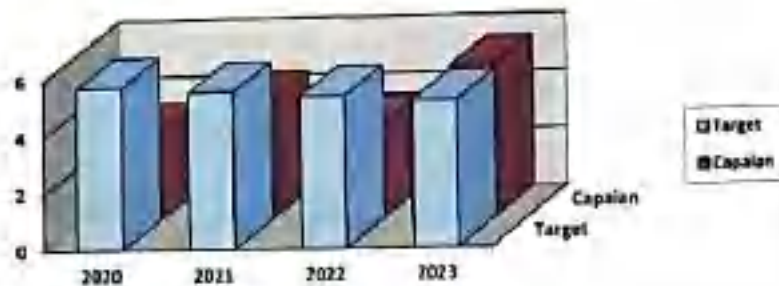
Dari grafik di atas, prevalensi kekerasan terhadap perempuan cenderung di bawah target capaian, dan tahun 2023 baru melonjak di atas target capaian, dapat dilihat pada tabel di atas jumlah kasus yang meningkat di tiap tahunnya. Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mencatat sebanyak 49 kasus perempuan (terdiri dari 11 anak perempuan dan 38 perempuan dewasa) yang mengalami kekerasan dan mendapatkan layanan pada Lembaga layanan perlindungan perempuan. Sedangkan jumlah anak perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 11 orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 20% dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan didominasi oleh kekerasan fisik dan psikis. Sedangkan kasus kekerasan seksual juga bahkan dialami oleh perempuan dewasa. Pada kasus kekerasan pada anak perempuan didominasi oleh kekerasan seksual.

Data kasus yang dihimpun dari seluruh Lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak antara lain UPT PPA Kab. Belitung, Unit PPA Polres Belitung, SATGAS PPA, P2TP2A dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan antara lain bantuan hukum, layanan psikologis, layanan medis, dan lain-lain.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Pemutakhiran data dan informasi gender;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait;
- 3) Peningkatan kemampuan kompetensi Pegawai melalui diklat/pelatihan.

Grafik 2.4
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 – 2023



Dari grafik di atas, prevalensi kekerasan terhadap perempuan cenderung di bawah target capaian, dan tahun 2023 baru melonjak di atas target capaian, dapat dilihat pada tabel di atas jumlah kasus yang meningkat di tiap tahunnya. Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mencatat sebanyak 49 kasus perempuan (terdiri dari 11 anak perempuan dan 38 perempuan dewasa) yang mengalami kekerasan dan mendapatkan layanan pada Lembaga layanan perlindungan perempuan. Sedangkan jumlah anak perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 11 orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 20% dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan didominasi oleh kekerasan fisik dan psikis. Sedangkan kasus kekerasan seksual juga bahkan dialami oleh perempuan dewasa. Pada kasus kekerasan pada anak perempuan didominasi oleh kekerasan seksual.

Data kasus yang dihimpun dari seluruh Lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak antara lain UPT PPA Kab. Belitung, Unit PPA Polres Belitung, SATGAS PPA, P2TP2A dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan antara lain bantuan hukum, layanan psikologis, layanan medis, dan lain-lain.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Pemutakhiran data dan informasi gender;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait;
- 3) Peningkatan kemampuan kompetensi Pegawai melalui diklat/pelatihan.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh :

1) Adanya sumber anggaran yang memadai

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan :

- 1) Meningkatkan SDM Pelayanan;
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan;
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat/ pelatihan sesuai dengan tupoksinya;
- 4) Meningkatkan koordinasi kepada OPD terkait.

5) Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kebijakan KLA sudah diratifikasi sejak tahun 2006. Sementara, pada Tahun 2019, Kabupaten Belitang meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat pertama dengan skor perolehan Penilaian Mandiri sebesar 609,93. Dan di tahun 2023 KLA Kabupaten Belitang meraih predikat tingkat Madya.

Pengembangan KLA di setiap Kabupaten/Kota harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar terdistribusi dalam 5 kluster hak anak, yakni

- (1) Hak sipil dan kebebasan;
- (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- (5) Perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.

Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yaitu Predikat Pratama. Skor Capaian KLA dari Kementerian PPA RI tahun 2021 yaitu 583,7 point dan tahun 2022 yaitu 581,52 point. Tingkat KLA berdasarkan Evaluasi KLA adalah KLA Tingkat Pratama (nilai 500 – 600), KLA Tingkat Madya (nilai 601 – 700), dan KLA Tingkat Nindya (nilai 701 – 800). Faktor pendorong KLA antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil

bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitang dalam mewujudkan KLA.

Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitang dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Solusi kedepan antara lain adalah :

1. Pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif menyuarakan aspirasi anak.
2. Meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak.
3. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif
4. Pemerintah perlu membuat sistem pengelolaan data secara khusus untuk mengintegrasikan data anak.
5. Pemerintah perlu mengikutsertakan kepentingan anak pada proses pembangunan

Dalam mengatasi masalah yang menjadi faktor penghambat antara lain adalah:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana
- b. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan hak anak khususnya berbagai fasilitas yang ramah dan layak bagi anak
- c. Penguatan komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan
- d. Memperbaiki kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.
- e. Meningkatkan kapasitas anggaran desa demi mewujudkan desa/kelurahan layak anak

6) Prevalensi kekerasan terhadap anak

Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap anak didapat dari rumusan risiko anak yang memerlukan perlindungan khusus. Untuk tahun 2023 dengan nilai sebesar 12,97 yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus berjumlah 74 orang (terdiri dari 13 anak korban kekerasan, 57 anak

dengan disabilitas, dan 4 anak yang berhadapan dengan hukum), meningkat dibanding tahun 2022 berjumlah 50 orang.

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu dihitung dari Jumlah anak yang memerlukan perlindungan (anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum) dibagi dengan jumlah penduduk anak dikali 10.000. Nilai capaian indikator prevalensi ini mengalami peningkatan dan di atas target (indikator negatif). Jumlah korban kekerasan anak dapat dilihat pada tabel berikut :

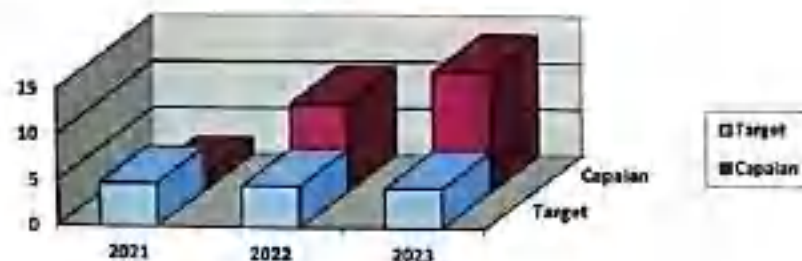
Tabel 2.20
Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus tahun 2023

Tahun	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan (anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum)	Jumlah Penduduk Anak	Capaian dikali 10.000	Target Capaian
2021	10	55.283	1,81	4,8
2022	50	52.661	9,5	4,6
2023	74	57.042	12,97	4,4

Pada tabel di atas dapat prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 sebesar 12,97 lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 4,4 dan ini merupakan indikator negatif. Pencapaian Angka kekerasan di Kabupaten Belitung Tahun 2022 dan 2023 di atas target dengan indikator negatif.

Prevalensi juga dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 2.5
Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2020 – 2023



Dari grafik di atas, prevalensi kekerasan terhadap anak dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan dan di atas target negatif.

Tahun 2023, Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang mencatat sebanyak 74 orang anak yang mendapatkan perlindungan (13 kasus anak yang mengalami kekerasan, 57 anak dengan disabilitas, dan 4 anak yang berhadapan dengan hukum) dan mendapatkan layanan pada Lembaga layanan perlindungan anak. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 3,47% dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan didominasi oleh kekerasan fisik dan psikis juga terdapat kasus kekerasan seksual pada anak. Data kasus yang dihimpun dari seluruh Lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak antara lain UPT PPA Kab. Belitang, Unit PPA Polres Belitang, SATGAS PPA, PZTP2A dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan antara lain bantuan hukum, layanan psikologis, layanan medis, dan lain-lain.

Jumlah anak korban kekerasan mengalami kenaikan di tahun 2022 dan Kembali menurun di tahun 2023. Hal ini menjadi catatan bahwa upaya untuk pencegahan anak menjadi korban kekerasan perlu ditingkatkan. Layanan terhadap anak-anak dengan perlindungan terus dilakukan dan upaya-upaya terhadap pencegahan juga terus dilakukan. Adapun indikator prevalensi perlindungan anak adalah anak dengan masalah hukum, anak disabilitas, anak dengan HIV/AIDS dan lain-lain.

Faktor pendukung daripada layanan penanganan kasus antara lain adalah semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tugas dan fungsi dari lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Hambatan yang dialami antara lain adalah kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dalam pelayanan penanganan kasus, koordinasi yang belum sinergis antara lembaga layanan dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti tersedianya UPTD PPA sebagai pemangku pelaksana layanan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu permasalahan pada ranah domestik juga sering mendapat hambatan karena masyarakat cenderung sering menutupi karena merasa bahwa permasalahan ini adalah aib.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk

mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait;
- 2) Komitmen dan Sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan instansi terkait pemenuhan hak anak.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh :

- 1) Adanya sumber anggaran yang memadai.
- 2) Data yang belum terintegrasi, lamutakhir, dan dimanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan/ kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan :

- 1) Meningkatkan SDM Pelayanan;
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan;
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat/ pelatihan sesuai dengan tupoksinya;
- 4) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada Stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Adapun Analisis Realisasi Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat terlihat pada Tabel 2.21, berikut :

Tabel 2.21
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2019-2023					Realisasi Anggaran 2019-2023					Rasio antara realisasi dan anggaran					Data-rata Perhitungan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Persentase penurunan PMKS per tahun			7.511,9 24.333	5.325,1 55.297	10.020 540.356			7.136,3 68.241	3.573,0 91.064	9.073,0 93.326			83,72 %	87,1 0%	90,5 4	7.619.209.993	5.549.124.210
2	Persentase PMKS yang tertangani			7.511,9 24.333	5.325,1 55.297	10.020 540.356			7.136,3 68.241	3.573,0 91.064	9.073,0 93.326			83,72 %	87,1 0%	90,5 4	7.619.209.993	5.549.124.210
3	Penerapan PMKS yang menerima program pembinaan sosial			487,71 2.305	3.881,5 79.041	668,80 8.764			307,21 2.490	2.273,2 92.375	362,06 3.507			62,89 %	58,4 0%	88,5 0	1.594.700.067	980.852.827
4	Penerapan pendampingan terpadu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta pengidap gangguan jiwa yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial			944,55 3.400	589,15 7.040	472,69 4.479			576,84 3.580	473,57 8.624	391,80 8.672			65,81 %	84,7 0%	82,8 9	558.801.820	481.410.398
5	Terpenuhiya perlindungan dan jaminan sosial			409,31 0.800	426,31 1.950	738,33 6.850			402,43 1.275	420,18 5.855	481,41 4.804			98,56 %	98,5 6%	100,0 0	524.286.433	434.877.345
6	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana			689,31 9.800	445,10 5.800	444,43 0.180			637,08 8.356	402,25 9.450	388,70 8.200			91,14 %	90,3 4%	87,4 6	493.048.847	442.717.335
7	Taman Makam Rahlewan yang urala			4.691,8 01	8.721,6 50	66.875 400			2.004,5 00	3.584 560	82.405 1.000			42,21 %	53,3 3	94,7 5	32.867.887	29.351.353
8	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan			4.583,8 84.268	4.041,3 50.613	4.719,8 20.449			4.588,6 84.049	4.319 635,38	4.518 274,30			99,99 %	94,2 9%	95,7 3	4.628.399.450	4.472.854.579
9	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah			—	18.150 900	—			—	18.131 850	—			—	99,8 0%	—	6.050.000	6.043.950
10	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan perangkat daerah			513,05 0.000	573,32 0.350	910,32 0.811			460,87 0.292	562,50 6.110	482,58 3.330			89,84 %	98,4 6%	94,5 8	531.563.754	601.986.569

11	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	280.30 2.000	329.32 7.100	2.505.0 53.322						267.17 0.940	250.53 0.378	2.385 757.41 0				95,32 %	76,0 7%	89,8 4	1.082.804.141	561.154.529
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	838.38 4.886	879.89 1.705	867.74 9.665						455.14 5.270	576.25 3.375	541.36 2.584				66,17 %	50,4 7%	90,8 3	727.075.463	357.587.210
13	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	838.38 4.886	1.141,7 54.810	867.74 9.665						455.14 5.270	576.25 3.375	541.36 2.584				66,17 %	50,4 7%	90,8 3	681.829.851	557.567.210
14	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	294.03 8.940	850.03 3.630	517.54 7.970						243.50 8.905	324.25 7.269	209.31 2.773				85,73 %	35,4 4%	90,3 2	550.540.213	259.026.314
15	Persentase pertanggung jawaban pembiayaan pemenuhan	511.20 2.708	228.83 3.055	103.86 5.803						177.14 4.850	191.54 2.025	89.449 911				34,65 %	84,8 4%	88,1 2	279.233.056	152.712.285
16	Persentase keluarga yang terlayani	-	27.260 625	-						-	31.228 225	-				-	85,2 1%	-	9.088.942	7.742.742
17	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	44.142 340	41.827 470	42.703 154						34.651 420	37.225 8.101	42.600 300				70,14 %	89,0 0%	99,7 6	42.890.975	39.105.859
18	Kabupaten Layak Anak (KLA)	194.01 5.075	216.73 8.166	234.53 1.286						135.51 6.225	209.66 8.101	231.66 4.188				73,99 %	80,7 4%	97,1 2	216.428.176	192.262.838
19	Prevalensi kekerasan terhadap anak	194.01 5.075	216.73 8.166	234.53 1.286						135.51 6.225	209.66 8.101	231.66 4.188				73,99 %	80,7 4%	97,1 2	216.428.176	192.262.838
20	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	125.23 1.650	190.40 1.171	173.20 3.252						75.376 100	164.59 9.426	166.49 0.740				61,12 %	94,1 5%	98,1 2	103.545.324	143.155.422
21	Persentase anak korban kekerasan yang diangsur instansi terkait kabupaten	55.783 523	26.336 920	65.328 034						67.140 120	25.068 675	65.173 448				86,86 %	93,1 2%	99,7 6	52.402.951	49.127.416

Penjelasan tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa :

- a. Secara garis besarnya, realisasi anggaran pelayanan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas 80%. Terutama untuk kinerja pelayanan rutin setiap tahunnya.
- Terdapat realisasi program (tahun 2023) yang masih di bawah 80%, yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan indikator terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial. Realisasi keuangan sebesar 65,20%.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut : Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial sebesar 88,31%. Alokasi anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 738.336.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 481.414.604,- setara dengan 65,20% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 738.336.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 481.414.604,- setara dengan 65,20%. *Output* kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi. *Outcome* kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat.

Faktor pendorong : Sistem informasi (SIKS-NG) yang cukup memadai

Faktor penghambat : masih adanya PSM yang tidak aktif dalam melakukan verifikasi ketidaklayakan dan pemadanan dukcapit, masih adanya petugas pengisi data desa/ kelurahan yang terkendala dalam mengakses sistem SIKS-NG dikarenakan tidak memiliki laptop, belum adanya anggaran dalam peningkatan kapasitas PSM/ Pengisi data Desa/ Kelurahan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 474.336.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 462.351.354,- atau setara dengan 97,35%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota.

Faktor pendorong : Sistem informasi (SIKS-NG) yang cukup memadai

Faktor penghambat : masih adanya PSM yang tidak aktif dalam melakukan

verifikasi ketidaklayakan dan pemadanan dukcapil, masih adanya petugas pengisi data desa/ kelurahan yang terkendala dalam mengakses sistem SIKS-NG dikarenakan tidak memiliki laptop, belum adanya anggaran dalam peningkatan kapasitas PSM/ Pengisi data Desa/ Kelurahan.

Upaya/ Solusi ke depan : perlunya dilakukan verifikasi penerima bantuan agar penerima bantuan baik DPNT, PKH benar-benar masyarakat yang layak dan masyarakat yang tidak layak bisa dikeluarkan dari bantuannya.

- b. Sub Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.398.212,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.063.250,- atau setara dengan 7,24%. *Output* dari kegiatan adalah Jumlah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja dan realisasi anggaran kurang dari 80% dikarenakan program ini merupakan program inovasi baru sehingga belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Pada tahun 2023 sudah masuk beberapa proposal usulan. Akan tetapi, tidak semua usulan proposal yang masuk disetujui karena tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Bupati Belitang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Faktor pendorong :

- Masih adanya masyarakat yang belum atau tidak ter-cover bantuan atau program pemerintah daerah.
- Masih ditemukan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- Terkait dengan bantuan sosial kepada individu, faktor pendorongnya yaitu sudah adanya data calon penerima hasil verifikasi desa/ kelurahan terkait Desa PKH yang ditetapkan.

Faktor penghambat :

- Belum tersosialisasikannya Peraturan Bupati Belitang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada masyarakat secara menyeluruh
- Proposal usulan bantuan yang disampaikan masyarakat tidak memenuhi kriteria.
- Belum adanya payung hukum untuk pencairan bantuan kepada calon penerima data PKH, waktu untuk pelaksanaannya tidak memungkinkan lagi.

- Upaya/ solusi ke depan : Mensosialisasikan Program Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada tingkat Tingkat Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang juga merupakan salah satu pemangku urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Urusan Sosial. Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah disusun dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Target pencapaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan Dasar yang diperoleh pada setiap tahunnya.

Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dasar yang tertuang dalam Program dan Kegiatan adalah pemberian bantuan pemakanan atau pemenuhan kebutuhan pangan/pokok bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan dan pengemis.

Selain itu pemenuhan kebutuhan lainnya berupa fasilitas untuk pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan alat bantu, pemenuhan penyediaan Administrasi Kependudukan, fasilitas pengobatan atau bantuan biaya berobat kepada pihak lain, serta penyediaan sandang.

Realisasi dari pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023 dapat tergambar dalam tabel 2.22. berikut :

TABEL 2.22
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					98,88 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		30	30	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00 %	

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	30	30	0	100.00 %	
	2. Penyediaan layanan kedarifatan / layanan reaksi cepat	Orang	30	30	0	100.00 %	
	3. Penyediaan permaknaan	Orang	30	30	0	100.00 %	
	4. Penyediaan sandang	Orang	30	30	0	100.00 %	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100.00 %	
	6. Penyediaan pembekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	30	30	0	100.00 %	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	30	30	0	100.00 %	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlintar	Orang	30	30	0	100.00 %	
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Buku dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00 %	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	11. Pemberian pelayanan penumbuhan keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	30	30	0	100.00 %	
	13. Layanan rujukan	Orang	30	30	0	100.00 %	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		15	15	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	2. Penyediaan layanan kedarifatan/ layanan reaksi cepat	Orang	15	15	0	100.00 %	

3. Penyediaan permakaman	Orang	15	15	0	100.00 %
4. Penyediaan sandang	Orang	15	15	0	100.00 %
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	15	15	0	100.00 %
6. Penyediaan perlengkapan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	15	15	0	100.00 %
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	15	15	0	100.00 %
8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bakti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00 %
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %
10. Pemberian pelayanan pemenuhan keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15	15	0	100.00 %
12. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %
3. Rehabilitasi Sosial Disabilitas Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					99.33 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	98.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		60	60	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.33 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96.52 %
1. Layanan data dan pengaduan	Orang	60	60	0	100.00 %
2. Penyediaan layanan kebaruratan / layanan reseski cepat	Orang	60	60	0	100.00 %
3. Penyediaan permakaman	Orang	60	60	0	100.00 %
4. Penyediaan sandang	Orang	60	60	0	100.00 %
5. Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	0	100.00 %
6. Penyediaan perlengkapan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	60	60	0	100.00 %
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	60	60	0	100.00 %
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	60	60	0	100.00 %

9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	3	2	60.00 %	
10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
11. Pemberian pelayanan pemusutan keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %	
12. Pemberian pelayanan resusitasi keluarga	Orang	60	60	0	100.00 %	
13. Layanan rujukan	Orang	60	60	0	100.00 %	
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terealisasi	Yang Belum Terealisasi	80.00 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		39	39	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDN		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipecahkan	Jumlah Mutu Yang Terealisasi / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terealisasi / Terepenuhi	100.00 %	
1. Layanan data dan pengaduan	Orang	39	39	0	100.00 %	
2. Penyediaan layanan kedarifatan / layanan rapid cepat	Orang	39	39	0	100.00 %	
3. Penyediaan gizi makanan	Orang	39	39	0	100.00 %	
4. Penyediaan sandang	Orang	4	4	0	100.00 %	
5. Penyediaan pertolongan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	3	3	0	100.00 %	
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	39	39	0	100.00 %	
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00 %	
8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	4	4	0	100.00 %	
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	4	4	0	100.00 %	
10. Pemberian pelayanan pemusutan keluarga	Orang	39	39	0	100.00 %	
11. Pemberian pelayanan resusitasi keluarga	Orang	39	39	0	100.00 %	

	12. Layanan rujukan	Orang	39	39	0	100.00 %	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					95.00 %	
	Ya Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		24	24	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	75.00 %	
	1. Penyediaan permakanan	Orang	1	0	1	0.00 %	
	2. Penyediaan sandang	Orang	24	24	0	100.00 %	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	1	0	100.00 %	
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1	0	1	0.00 %	
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	24	24	0	100.00 %	

Untuk menunjang kelancaran program dan kegiatan Dinas, diperlukan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai. Sehingga untuk tahun berikutnya diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan jumlah SDM maupun kompetensi SDM tersebut.

Berikut disampaikan data Sarana dan Prasarana serta SDM sebagai penunjang pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Helitung. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23.

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Helitung
Sampai dengan per Juni 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Komputer PC	13	13	26
2	Meja Kantor	58	28	86
3	Pilking Kabinet	43	19	62
4	Kursi Kantor	188	33	223
5	Lemari Kantor	14	9	23
6	Printer	16	20	36
7	Laptop	3	5	8
8	Meja Rapat	7	2	9
9	UPS	5	6	11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana (asset) kantor sebagian besar kondisinya baik, namun masih terdapat beberapa asset dengan kondisi rusak terutama printer dan komputer yang paling penting digunakan untuk mendukung kelancaran operasional kantor.

Untuk memperlancar pekerjaan perlu penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk proses optimalisasi pekerjaan.

Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang belum terpenuhi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Data dihimpu berdasarkan penjerangan kebutuhan pada Sekretariat dan Bidang Teknis).

Tabel 2.24.

Daftar Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Personal Komputer (PC)	3 Unit	
2.	Laptop	5 Unit	
3.	Printer	4 Unit	
4.	UPS	3 Unit	
5.	Kamera Digital	5 Unit	
6.	Camera DSRL	2 Unit	
7.	AC 1 PK	7 Unit	
8.	Meja 1 Biro	5 Unit	
9.	Meja ½ Biro	5 Unit	
10.	Meja Komputer	5 Unit	
11.	Kursi Kerja sandaran tinggi	5 Unit	
	Kursi Kerja sandaran rendah	5 Unit	
	Lemari Asrip	10 Unit	
	Filing cabinet	5 Buah	
15.	Kursi tamu/ Sofa	4 Set	
16.	Dispenser	2 Unit	
17.	Mic Wireles	1 Unit	
18.	Wireles speaker	1 Unit	
19.	Tiang Mic	2 Buah	
20.	Sound system	1 Unit	
21.	Lampu emergency	2 Unit	
22.	Container Box Plastik	5 Unit	
23.	Tiang umbul-umbul besi	20 buah	
24.	Tenda pleton	3 Unit	
25.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	2 Unit	

Tabel 2.25.

Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang (Kendaraan Operasional) serta kebutuhannya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Tahun perolehan	Kondisi		Jumlah	Ket
			Baik	Rusak		
Aset Penunjang						
1	Mobil		5	-	5	
	Avenza	2005	1	-	1	APBD
	Evelin	2013	2	-	2	APBD
	Luxio (Motor)	2016	1	-	1	Kemen PPPA
	Triton	2020	1	-	1	APBD
2	Motor		12	-	12	
	RX King	2005	1	-	1	APBD
	Supra X	2006	1	-	1	
	Supra X	2008	2	-	2	
	Mega Pro	2008	2	-	2	
	Honda	2009	1	-	1	
	Honda GL	2009	1	-	1	
	Supra X	2012	1	-	1	
	Tiger	2012	1	-	1	
	Vario (Motor)	2016	2	-	2	Kemen PPPA
Aset Penunjang Lainnya						
3	Kendaraan Lain					
	Mobil Tangki		1	-	1	Kemensos RI
	Mobil Truk		1	-	1	
	Mobil Dapur Umum Lapangan		1	-	1	
	Perahu Dolphin		2	-	2	
	Motor		1	-	1	

Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang kelancaran operasional kantor sebagian besar dalam kondisi baik. Namun masih terdapat beberapa kebutuhan kendaraan roda dua untuk operasional lapangan yaitu evakuasi Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) maupun untuk operasional lapangan lainnya dikarenakan kendaraan roda dua yang ada rusak ringan dan mengalami penyusutan. Adapun kendaraan roda dua dibutuhkan untuk kelancaran operasional Kepala Seksi dan Kepala Bagian.

Tabel 2.26.
Jumlah Asset Tidak Bergerak
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Tanah	V		4
	↳ Tanah Bangunan Kantor	V		1
	↳ Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	V		1
	↳ Tanah Loka Bina Karya	V		1
	↳ Makam Pahlawan	V		1
2.	Bangunan			4
	↳ Bangunan Gedung Kantor	V		1
	↳ Bangunan Rumah Pelayanan dan Perlindungan Sosial	V		1
	↳ Bangunan Gedung Karang Taruna	V		1
	↳ Bangunan Gedung Loka Bina Karya	V		1
	↳ Bangunan Pendidikan dan Pelatihan		V	1

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memiliki Asset tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan, yaitu Tanah untuk bangunan Kantor dan Tanah Loka Bina Karya (LBK), Taman Makam Pahlawan (TMP), Gedung Karang Taruna, serta tanah dan bangunan Pendidikan

dan pelatihan yang terletak di Kecamatan Badau dengan kondisi bangunan Rusak Berat.

b. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai pada Tahun 2024 sebanyak 42 orang terdiri dari 31 orang ASN dan P3K, 11 Orang tenaga honorer.

Tabel 2.27

Jumlah Pegawai menurut Jenis Pendidikan

Per 31 Desember 2023

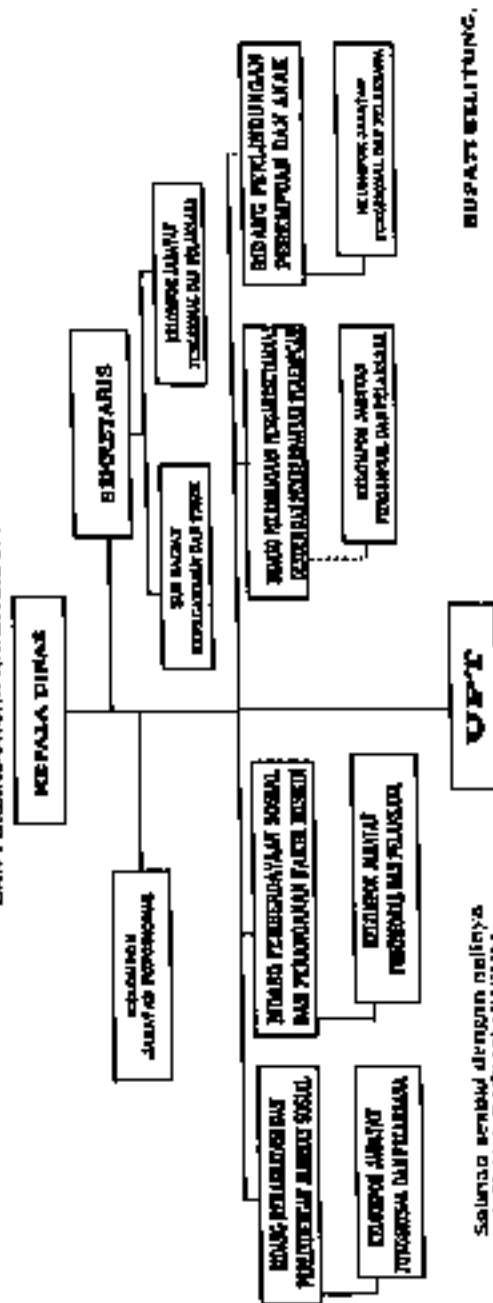
NO	JENIS PENDIDIKAN	STATUS PEGAWAI						JUMLAH	
		PNS		PPPK		HONORER			
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	TENAGA SARJANA								
1	S2 Manajemen Ekonomi Publik	1	0					1	0
2	Sarjana Sosial / Kesejahteraan Sosial / Kessos Umum	0	1	1	1			1	2
3	Sarjana Sistem Informasi	1	0					1	0
4	Sarjana Agama Islam	1	0					1	0
5	Sarjana Administrasi Negara	2	1					2	1
6	Sarjana Manajemen Keuangan	0	1					0	1
7	Sarjana Sosiologi	0	1					0	1
8	Sarjana Pekerjaan Sosial	0	1					0	1
9	Sarjana Pendidikan	1	0					1	0
10	Sarjana Teknik Kimia	0	1					0	1
11	Sarjana Perikanan	1	0					1	0
12	D – IV Pekerja Sosial	3	0					3	0
13	Sarjana Psikologi	2	1	0	1			2	2
14	Sarjana Hubungan Internasional	1	0					1	0
15	D4 Manajemen Informatika					1	0	1	0
16	Sarjana PGSD / Penjas					1	0	1	0
Total		13	7	1	2	2	0	16	9

II	TENAGA SARJANA MUDA /AKADEMI/D3								
1	D3 Manajemen Informatika	0	2					0	2
2	D3 Perpajakan	0	1					0	1
3	D3 Akuntansi	0	1					0	1
4	D3 Manajemen Administrasi Perkantoran					0	0	0	0
Total		0	4			0	0	0	4
III	SEKOLAH MENENGAH ATAS								
1	SMA/ SMU	2	0			4	3	6	3
2	SMEA/ SMK	0	0			0	1	0	1
3	STM	0	0					0	0
4	SMKK	0	1					0	1
5	SMP	0	0			1	0	1	0
Total		2	1	0	0	5	4	7	5
JUMLAH TOTAL		15	12	1	2	7	4	23	18

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG**



Selama waktu dimasa nyalinya
KEPALA BANGKAL MUKUM,

[Signature]
BUTARNO, S.H.
NIP. 19800312-200903 1 0003

BUPATI BELITUNG,

td.

SALANE SALEH

Grafiker 2.6 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Tabel 2.28.

**Alokasi Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung**

No	Organisasi	L	P	Ket (Non ASN)
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	3	5	5 Non ASN : 3 Cleaning Service, 1 Supir, 1 Penjaga Malam
3	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	6	2	2 Non ASN : 1 orang Petugas Pengelola Gudang Logistik dan Kendaraan Operasional Kebersamaan/ Operator Komputer dan 1 orang Petugas Isipangan pendamping rehabilitasi sosial
4	Didang Pemberdayaan Sosial dan Pemangsaan Fakir Miskin	3	3	2 Orang Non ASN : 1 Tenaga Administrasi LKJ, 1 Tenaga operator computer
5	Bidang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2	1	2 Orang Non ASN : 1 Operator komputer, 1 petugas administrasi
6	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	1	2	-
7	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	-	2	-
	Jumlah	16	15	
	Jumlah	31 ASN		11 Non ASN

Tabel 2.29

Jumlah Pegawai ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat Pim	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai belum diklat
1	Diklat Pim IV	8 orang	5 orang
2	Diklat Pim III	4 orang	-
3	Diklat Pim II	1 orang	-

Berdasarkan tabel 2.10. di atas, dapat diketahui bahwa Pejabat yang mengikuti Diklat Pim IV yang paling mendominasi yaitu sebanyak 8 orang, namun berdasarkan data kepegawaian, terdapat 5 orang yang telah memenuhi syarat kepangkatan yang belum mengikuti Diklat PIM IV.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa :

- Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum mencukupi untuk mengisi kekosongan yang ada dalam struktur organisasi tersebut sehingga diperlukan tambahan beberapa Pegawai untuk mengisi kekosongan agar organisasi berjalan lancar.
- Masih ditemukan beberapa pegawai yang menduduki jabatan belum mengikuti diklat PIM
- Pegawai yang belum lulusan S1 ataupun S2 diharapkan kedepannya agar bisa menamatkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Setelah diidentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka isu strategis yang akan diangkat diantaranya :

- Timbulnya kemandirian PMKS dan Peningkatan Kelautan Sosial Masyarakat.
- Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat.

- Fenomena berbagai kasus kemiskinan, perempuan, keluarga, remaja dan anak dapat muncul sebagai dampak kebijakan Pemerintah atau implikasi dari Dinamika Perubahan Sosial Budaya, politik dan ekonomi masyarakat.
- Adanya dinamika perubahan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap proporsi perempuan yang menduduki jabatan eksekutif, kurang adanya kegiatan sesama lembaga perempuan dan rendahnya aksesibilitas perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi dan hukum.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Terdapat review Rancangan Akhir Perangkat Daerah kegiatan telaahan yang dilakukan adalah mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan akhir RKPD kemudian membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi keseluruhan program dan kegiatan tahap-tahap sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 2.30. berikut :

Table 2.30. Review terhadap Rancangan Akhir SK'PD

THESE RESULTS WERE CONFIRMED BY A REPEATED MEASURES ANALYSIS OF THE DATA. THE REPEATED MEASURES ANALYSIS INDICATED THAT THE INTERACTIONS BETWEEN THE FACTORS OF TIME AND TREATMENT WERE SIGNIFICANT ($p < 0.05$).

[illegible]

No	Rancangan Akademi KKP					Berkas Analisis Kelayakan					Catatan Poin
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Papir Indikator (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Papir Indikator (Rp)	
1	Sub 1. 2. Penyusunan Program dan Analisis Kegiatan Program Kajian Anggar	17 Tanjungpinang dan	14 Kebijakan : Jumlah dokumen perencanaan dan analisis program rencana anggaran	12 2. Dalam an	11 2.999.420	Sub 2. 2. Penyusunan Program dan Analisis Kegiatan Program Kajian Anggar	15 Tanjungpinang dan	13 Kebijakan : Jumlah dokumen perencanaan dan analisis program rencana anggaran	12 2. Dalam an	11 2.999.420	12
			2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78,80 %				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78,80 %		
2	A. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kebijakan : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Berkas : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	36 Overag 78,80 %	43.311.000			Kebijakan : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Berkas : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	36 Overag 78,80 %	43.311.000	
	Sub 1. 2. Pengisian Penerimaan Data Berekas Anggar Kelayakan	16 Tanjungpinang dan	Kebijakan : Jumlah Penerimaan Data Berekas Anggar Kelayakan	2 Poin	18.312.000	Sub 2. 2. Pengisian Penerimaan Data Berekas Anggar Kelayakan	16 Tanjungpinang dan	Kebijakan : Jumlah Penerimaan Data Berekas Anggar Kelayakan	2 Poin	18.312.000	Pemeriksaan lampiran lampiran pengisian anggar
	Sub 2. 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tuga dan Fungsi	16 Tanjungpinang dan	Kebijakan : Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Overag	25.000.000	Sub 3. 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tuga dan Fungsi	16 Tanjungpinang dan	Kebijakan : Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Overag	25.000.000	Pemeriksaan lampiran lampiran pengisian anggar
			3. Persentase pelayanan administrasi pemerintahan perangkat daerah	100 %				3. Persentase pelayanan administrasi pemerintahan perangkat daerah	100 %		
3	A. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kebijakan : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Berkas : Persentase pelayanan administrasi pemerintahan perangkat daerah	100 % 100 %	344.843.148			Kebijakan : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Berkas : Persentase pelayanan administrasi pemerintahan perangkat daerah	100 % 100 %	344.843.148	
	Sub 1. 2. Penyusunan Komposisi Struktur Lantai Perencanaan Anggaran Kantor	16 Tanjungpinang dan	Kebijakan : Jumlah Penerimaan Struktur Lantai Perencanaan Anggaran Kantor yang Disetujui	1 Poin	9.551.555	Sub 2. 2. Penyusunan Komposisi Struktur Lantai Perencanaan Anggaran Kantor	16 Tanjungpinang dan	Kebijakan : Jumlah Penerimaan Struktur Lantai Perencanaan Anggaran Kantor yang Disetujui	1 Poin	9.551.555	
	Sub 2. 2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kantor	16 Tanjungpinang dan	Kebijakan : Jumlah Penerimaan dan Penganggaran Kantor yang Disetujui	2 Poin	21.485.182			Kebijakan : Jumlah Penerimaan dan Penganggaran Kantor yang Disetujui	2 Poin	21.485.182	
	Sub 3. 2. Penyusunan Perencanaan Rumah Tangga Kantor	16 Tanjungpinang dan	Kebijakan : Jumlah Penerimaan Rumah Tangga Kantor yang Disetujui	1 Poin	13.961.90			Kebijakan : Jumlah Penerimaan Rumah Tangga Kantor yang Disetujui	1 Poin	13.961.90	
	Sub 4. 2. Penyusunan Sistem Logistik Kantor	16 Tanjungpinang dan	Kebijakan : Jumlah Penerimaan Logistik Kantor yang Disetujui	2 Poin	117.718.250			Kebijakan : Jumlah Penerimaan Logistik Kantor yang Disetujui	2 Poin	117.718.250	

No.	Rencana Kerja BKT					Hasil Analisis Kebijakan					Catatan Poin
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Papir Indikator (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Papir Indikator (Rp)	
51	Sub 8 Pendanaan Akut ke Layanan Rawat Inpatient dan Rawat Jalan Di RS	Kabupaten Biring	Salah satu yang Mendorong Akut ke Layanan Rawat Inpatient dan Rawat Jalan Di RS	100%	1.115.000	Sub 8 Pendanaan Akut ke Layanan Rawat Inpatient dan Rawat Jalan Di RS	Kabupaten Biring	Salah satu yang Mendorong Akut ke Layanan Rawat Inpatient dan Rawat Jalan Di RS	100%	1.115.000	(2,1)
	Sub 9 Pendanaan Layanan Rawat Inpatient	Kabupaten Biring	Salah satu yang Mendorong Layanan Rawat Inpatient Di RS	100%	10.329.489	Sub 9 Pendanaan Layanan Rawat Inpatient	Kabupaten Biring	Salah satu yang Mendorong Layanan Rawat Inpatient Di RS	100%	10.329.489	
	Sub 10 Pendanaan Layanan Rawat Jalan	Kabupaten Biring	Salah satu yang Mendorong Pelayanan Rawat Jalan Di RS	100%	217.589.411	Sub 10 Pendanaan Layanan Rawat Jalan	Kabupaten Biring	Salah satu yang Mendorong Pelayanan Rawat Jalan Di RS	100%	217.589.411	
	Sub 11 Pendanaan Pelayanan Rawat Jalan	Kabupaten Biring	Salah satu yang Mendorong Pelayanan Rawat Jalan Di RS	100%	4.128.121	Sub 11 Pendanaan Pelayanan Rawat Jalan	Kabupaten Biring	Salah satu yang Mendorong Pelayanan Rawat Jalan Di RS	100%	4.128.121	
	Sub 12 Pendanaan Layanan Rawat Jalan	Kabupaten Biring	Salah satu yang Mendorong Layanan Rawat Jalan Di RS	100%	48.403.312	Sub 12 Pendanaan Layanan Rawat Jalan	Kabupaten Biring	Salah satu yang Mendorong Layanan Rawat Jalan Di RS	100%	48.403.312	

Berkas 1 (Materi 1)				Berkas 2 (Materi 2)				Berkas 3 (Materi 3)				Berkas 4 (Materi 4)			
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Page (dari total)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Page (dari total)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Page (dari total)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Page (dari total)
1. Kegiatan 1: Penyiapan Materi dan Fasilitas	1.1. Menyiapkan materi dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan.	100 %	10	1. Kegiatan 1: Penyiapan Materi dan Fasilitas	1.1. Menyiapkan materi dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan.	100 %	10	1. Kegiatan 1: Penyiapan Materi dan Fasilitas	1.1. Menyiapkan materi dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan.	100 %	10	1. Kegiatan 1: Penyiapan Materi dan Fasilitas	1.1. Menyiapkan materi dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan.	100 %	10
2. Kegiatan 2: Pelaksanaan Kegiatan	2.1. Menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana.	100 %	20	2. Kegiatan 2: Pelaksanaan Kegiatan	2.1. Menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana.	100 %	20	2. Kegiatan 2: Pelaksanaan Kegiatan	2.1. Menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana.	100 %	20	2. Kegiatan 2: Pelaksanaan Kegiatan	2.1. Menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana.	100 %	20
3. Kegiatan 3: Penyelesaian Kegiatan	3.1. Menyelesaikan kegiatan dengan baik.	100 %	30	3. Kegiatan 3: Penyelesaian Kegiatan	3.1. Menyelesaikan kegiatan dengan baik.	100 %	30	3. Kegiatan 3: Penyelesaian Kegiatan	3.1. Menyelesaikan kegiatan dengan baik.	100 %	30	3. Kegiatan 3: Penyelesaian Kegiatan	3.1. Menyelesaikan kegiatan dengan baik.	100 %	30
4. Kegiatan 4: Evaluasi Kegiatan	4.1. Melakukan evaluasi kegiatan.	100 %	40	4. Kegiatan 4: Evaluasi Kegiatan	4.1. Melakukan evaluasi kegiatan.	100 %	40	4. Kegiatan 4: Evaluasi Kegiatan	4.1. Melakukan evaluasi kegiatan.	100 %	40	4. Kegiatan 4: Evaluasi Kegiatan	4.1. Melakukan evaluasi kegiatan.	100 %	40
5. Kegiatan 5: Penyelesaian Kegiatan	5.1. Menyelesaikan kegiatan dengan baik.	100 %	50	5. Kegiatan 5: Penyelesaian Kegiatan	5.1. Menyelesaikan kegiatan dengan baik.	100 %	50	5. Kegiatan 5: Penyelesaian Kegiatan	5.1. Menyelesaikan kegiatan dengan baik.	100 %	50	5. Kegiatan 5: Penyelesaian Kegiatan	5.1. Menyelesaikan kegiatan dengan baik.	100 %	50

Kategori: Pendidikan				Kategori: Kesehatan				Kategori: Lainnya			
Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Prognosis Risiko	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Prognosis Risiko	Program dan Kegiatan
1. Kegiatan 1	Program dan Kegiatan	1.1. Kegiatan 1	1.1.1. Kegiatan 1	1.1.1.1. Kegiatan 1	1.1.1.1.1. Kegiatan 1	1.1.1.1.1.1. Kegiatan 1	1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 1	1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 1	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 1
2. Kegiatan 2	Program dan Kegiatan	2.1. Kegiatan 2	2.1.1. Kegiatan 2	2.1.1.1. Kegiatan 2	2.1.1.1.1. Kegiatan 2	2.1.1.1.1.1. Kegiatan 2	2.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 2	2.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 2	2.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 2	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 2	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 2
3. Kegiatan 3	Program dan Kegiatan	3.1. Kegiatan 3	3.1.1. Kegiatan 3	3.1.1.1. Kegiatan 3	3.1.1.1.1. Kegiatan 3	3.1.1.1.1.1. Kegiatan 3	3.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 3	3.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 3	3.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 3	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 3	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 3
4. Kegiatan 4	Program dan Kegiatan	4.1. Kegiatan 4	4.1.1. Kegiatan 4	4.1.1.1. Kegiatan 4	4.1.1.1.1. Kegiatan 4	4.1.1.1.1.1. Kegiatan 4	4.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 4	4.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 4	4.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 4	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 4	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 4
5. Kegiatan 5	Program dan Kegiatan	5.1. Kegiatan 5	5.1.1. Kegiatan 5	5.1.1.1. Kegiatan 5	5.1.1.1.1. Kegiatan 5	5.1.1.1.1.1. Kegiatan 5	5.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 5	5.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 5	5.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 5	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 5	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 5
6. Kegiatan 6	Program dan Kegiatan	6.1. Kegiatan 6	6.1.1. Kegiatan 6	6.1.1.1. Kegiatan 6	6.1.1.1.1. Kegiatan 6	6.1.1.1.1.1. Kegiatan 6	6.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 6	6.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 6	6.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 6	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 6	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 6
7. Kegiatan 7	Program dan Kegiatan	7.1. Kegiatan 7	7.1.1. Kegiatan 7	7.1.1.1. Kegiatan 7	7.1.1.1.1. Kegiatan 7	7.1.1.1.1.1. Kegiatan 7	7.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 7	7.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 7	7.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 7	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 7	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 7
8. Kegiatan 8	Program dan Kegiatan	8.1. Kegiatan 8	8.1.1. Kegiatan 8	8.1.1.1. Kegiatan 8	8.1.1.1.1. Kegiatan 8	8.1.1.1.1.1. Kegiatan 8	8.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 8	8.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 8	8.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 8	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 8	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 8
9. Kegiatan 9	Program dan Kegiatan	9.1. Kegiatan 9	9.1.1. Kegiatan 9	9.1.1.1. Kegiatan 9	9.1.1.1.1. Kegiatan 9	9.1.1.1.1.1. Kegiatan 9	9.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 9	9.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 9	9.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 9	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 9	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 9
10. Kegiatan 10	Program dan Kegiatan	10.1. Kegiatan 10	10.1.1. Kegiatan 10	10.1.1.1. Kegiatan 10	10.1.1.1.1. Kegiatan 10	10.1.1.1.1.1. Kegiatan 10	10.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 10	10.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 10	10.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 10	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 10	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan 10

Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat, bahwa Program/ Kegiatan maupun sub kegiatan sudah masuk dalam Rencana RKPD 2025.

Tabel 2.31.

Program dan Kegiatan yang tidak muncul dalam RKPD 2025

No.	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Plafon Anggaran	Catatan
-	-	-	-	-	-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten dikumpulkan berdasarkan hasil - hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten.

Berikut adalah daftar usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat

Tabel 2.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan
Tahun 2025 Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1.	-	-	-	-

Untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang, belum ada usulan yang masuk pada Musrenbang 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tetaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025 adalah

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Stabilitas pelukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa untuk mencapai tujuan nasional perlu adanya penguatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu melalui program yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan TMP
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
9. Program Perlindungan Perempuan
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
12. Program Pemanuhan Hak Anak (PHA)
13. Program Perlindungan Khusus Anak.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai dalam pada tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tujuan pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Belitung, yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS
2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Hasil (sasaran) yang akan dicapai secara nyata setiap tahunnya selama 3 tahun dari tahun 2024 sampai dengan 2026, yaitu :

1. Meningkatnya penanganan PMKS
2. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
3. Meningkatnya kualitas hidup anak.

3.2.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Mendukung pencapaian visi dan Misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJPD / RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yaitu :

Terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dan mewujudkan Misi:

Misi Kesatu	Memfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai perwujudan aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi Kedua	Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah.

- (2) Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goal's* (SDG's). Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2022 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Bagian SDG's yang didukung oleh perangkat Daerah yaitu SDGs ke - 1. Menghapus Kemiskinan, 2. Menghapus Kelaparan, 3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 4. Pendidikan Bermutu, 5. Kesetaraan Gender, 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, 10. Mengurangi Ketimpangan, 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab, dan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.
- (3) Mendukung Pencapaian NSPK dan SPM. Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). NSPK/SPM yang didukung oleh program dan kegiatan perangkat daerah adalah sebagai berikut :
- Kehabililitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti
 - Kehabililitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti
 - Rehabilitasi sosial dasar galandangan dan pengemis di luar Panti
 - Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.
- (4) Mendukung pencapaian 16 Program Inovatif kepala daerah yaitu Program Sehat (Sistem Pelayanan Kesehatan Terintegrasi), Program Simpor (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga), Program

Ambong (Program asistensi dan asupan makanan tambahan untuk balita dan ibu mengandung) dan Program SOS Center (Berupa Tolp ke SOS/ Aplikasi masyarakat menghubungi SOS Center : Damkar, Ambulance, PMI, Tagana, BNPB, POL PP)

- (5) Mendukung Pencapaian KEK
- (6) Mendukung KSPN
- (7) Mendukung KPPN

Dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung merencanakan 13 (tiga belas) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan serta 70 (Tujuh Puluh) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 9.105.672.691,- (Sembilan Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Dengan lokasi kegiatan sebagai berikut : Luar Daerah dan di Kecamatan Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong dan Selat Nasik serta Luar Daerah Kabupaten Belitung.

Kumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sesuai dengan dokumen RKPD 2025 terdapat dalam Tabel 3.1 berikut :

No	Materi	Kerangka Kerja Pembelajaran (K3P) / Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan / Kegiatan Pembelajaran	Profil Keahlian Kejuruan (PKK)			Kejuruan / Kompetensi Kejuruan			Pengetahuan			Keterampilan			Sikap		
				Capaian Pembelajaran (CP)	Indikator	Pengetahuan	Kejuruan / Kompetensi Kejuruan	Pengetahuan	Kejuruan / Kompetensi Kejuruan	Pengetahuan	Kejuruan / Kompetensi Kejuruan	Pengetahuan	Kejuruan / Kompetensi Kejuruan	Pengetahuan	Kejuruan / Kompetensi Kejuruan	Pengetahuan	Kejuruan / Kompetensi Kejuruan	Pengetahuan
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1

No	Uraian	Kategori Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Capaian Kinerja dan Sasaran			Prioritas		Uraian Kegiatan	Target Waktu	Target Jumlah	Target Biaya	Target Waktu	Target Jumlah	Target Biaya
				Target Waktu	Target Jumlah	Target Biaya	Target Waktu	Target Jumlah							
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6	1.1.1.1.7	1.1.1.1.8	1.1.1.1.9	1.1.1.1.10	1.1.1.1.11	1.1.1.1.12
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.1.1.3	2.1.1.1.4	2.1.1.1.5	2.1.1.1.6	2.1.1.1.7	2.1.1.1.8	2.1.1.1.9	2.1.1.1.10	2.1.1.1.11	2.1.1.1.12
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.2	3.1.1.1.3	3.1.1.1.4	3.1.1.1.5	3.1.1.1.6	3.1.1.1.7	3.1.1.1.8	3.1.1.1.9	3.1.1.1.10	3.1.1.1.11	3.1.1.1.12
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.2	4.1.1.1.3	4.1.1.1.4	4.1.1.1.5	4.1.1.1.6	4.1.1.1.7	4.1.1.1.8	4.1.1.1.9	4.1.1.1.10	4.1.1.1.11	4.1.1.1.12
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.1.1.1.4	5.1.1.1.5	5.1.1.1.6	5.1.1.1.7	5.1.1.1.8	5.1.1.1.9	5.1.1.1.10	5.1.1.1.11	5.1.1.1.12
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.2	6.1.1.1.3	6.1.1.1.4	6.1.1.1.5	6.1.1.1.6	6.1.1.1.7	6.1.1.1.8	6.1.1.1.9	6.1.1.1.10	6.1.1.1.11	6.1.1.1.12
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.2	7.1.1.1.3	7.1.1.1.4	7.1.1.1.5	7.1.1.1.6	7.1.1.1.7	7.1.1.1.8	7.1.1.1.9	7.1.1.1.10	7.1.1.1.11	7.1.1.1.12
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.2	8.1.1.1.3	8.1.1.1.4	8.1.1.1.5	8.1.1.1.6	8.1.1.1.7	8.1.1.1.8	8.1.1.1.9	8.1.1.1.10	8.1.1.1.11	8.1.1.1.12
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.2	9.1.1.1.3	9.1.1.1.4	9.1.1.1.5	9.1.1.1.6	9.1.1.1.7	9.1.1.1.8	9.1.1.1.9	9.1.1.1.10	9.1.1.1.11	9.1.1.1.12
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.2	10.1.1.1.3	10.1.1.1.4	10.1.1.1.5	10.1.1.1.6	10.1.1.1.7	10.1.1.1.8	10.1.1.1.9	10.1.1.1.10	10.1.1.1.11	10.1.1.1.12
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.2	11.1.1.1.3	11.1.1.1.4	11.1.1.1.5	11.1.1.1.6	11.1.1.1.7	11.1.1.1.8	11.1.1.1.9	11.1.1.1.10	11.1.1.1.11	11.1.1.1.12
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.2	12.1.1.1.3	12.1.1.1.4	12.1.1.1.5	12.1.1.1.6	12.1.1.1.7	12.1.1.1.8	12.1.1.1.9	12.1.1.1.10	12.1.1.1.11	12.1.1.1.12
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.2	13.1.1.1.3	13.1.1.1.4	13.1.1.1.5	13.1.1.1.6	13.1.1.1.7	13.1.1.1.8	13.1.1.1.9	13.1.1.1.10	13.1.1.1.11	13.1.1.1.12
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.2	14.1.1.1.3	14.1.1.1.4	14.1.1.1.5	14.1.1.1.6	14.1.1.1.7	14.1.1.1.8	14.1.1.1.9	14.1.1.1.10	14.1.1.1.11	14.1.1.1.12
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.2	15.1.1.1.3	15.1.1.1.4	15.1.1.1.5	15.1.1.1.6	15.1.1.1.7	15.1.1.1.8	15.1.1.1.9	15.1.1.1.10	15.1.1.1.11	15.1.1.1.12
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.2	16.1.1.1.3	16.1.1.1.4	16.1.1.1.5	16.1.1.1.6	16.1.1.1.7	16.1.1.1.8	16.1.1.1.9	16.1.1.1.10	16.1.1.1.11	16.1.1.1.12
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.2	17.1.1.1.3	17.1.1.1.4	17.1.1.1.5	17.1.1.1.6	17.1.1.1.7	17.1.1.1.8	17.1.1.1.9	17.1.1.1.10	17.1.1.1.11	17.1.1.1.12

No.	Date	Executive Summary/Project/Program/Activity/Expense	Initiative/Strategy/Program/Project/Activity/Expense	Business Objective/Target/Key Result Area/Value	Current Status and Key Milestones/Performance				Financials		Human Resources		Performance/Impact/Value		Remarks/Notes/Comments
					Target/Value	Actual/Value	Delta/Value	Percentage/Value	Amount/Value	Unit/Value	Number/Value	Quality/Value	Score/Value	Rating/Value	
1	2023-01-01	Project A: New Product Development	Project A: New Product Development	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	2023-01-01	Project B: Marketing Campaign	Project B: Marketing Campaign	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	2023-01-01	Project C: Sales Promotion	Project C: Sales Promotion	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2023-01-01	Project D: Customer Service Improvement	Project D: Customer Service Improvement	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2023-01-01	Project E: IT System Upgrade	Project E: IT System Upgrade	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	2023-01-01	Project F: HR Policy Review	Project F: HR Policy Review	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	2023-01-01	Project G: Legal Compliance Audit	Project G: Legal Compliance Audit	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	2023-01-01	Project H: Financial Reporting System	Project H: Financial Reporting System	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	2023-01-01	Project I: Environmental Impact Assessment	Project I: Environmental Impact Assessment	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	2023-01-01	Project J: Social Media Strategy	Project J: Social Media Strategy	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Lokasi	Uraian Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pembacaan Ekspansi Target Kinerja COP Bulan 1014	Capaian Kinerja dan Urusan Pendanaan				Pembacaan		Pembacaan Majelis Rajasa 2014		Pembacaan Ekspansi Rajasa 2014
					Target 2014	Papir Indikator (Rp)	Salah Kategori	Salah Kategori	Normal Dampak	Normal Dampak	Target Capaian Kinerja	Salah Kategori Indikator	
1	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
2	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
3	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
4	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
5	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
6	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
7	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
8	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
9	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
10	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014

No	Kode	Daftar Isi	Judul	Penyusunan	Tipe	Cuplikan Kliping dan Zaman Kritis				Pengaruh		Tipe	Tipe	Tipe	Tipe
						Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
1	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
2	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
3	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
4	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
5	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
6	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
7	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
8	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
9	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
10	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Uraian Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan	Prediksi Capaian Target Kinerja (RPJMD Tahun 2025)			Capaian Kinerja dan Luas Kegiatan Pelaksanaan				Pencapaian		Pencapaian Target 2025		Pencapaian (Berkas)
				Target 2025	Peta Indikator (RPJMD)	Saluran	Target 2025	Saluran	Saluran	Saluran	Saluran	Saluran	Target 2025	Saluran	
1	101	Program : PROGRAM PENGENDALIAN TARIKUS KURANG PANDAI AKSI	Tarakan Miskin Pendidikan yang kurang	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100 %
2	102	Sub Kegiatan : Pembinaan Tarakan Miskin Pendidikan Nasional	Kebijakan : Terlewatnya pengalokasian sumber belajar pendidikan	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100 %
3	103	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tarakan Miskin Pendidikan Nasional	Rehabilitasi : Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100 %
4	104	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemeliharaan Tarakan Miskin Pendidikan Nasional	Pemeliharaan : Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100 %
5	105	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemeliharaan Tarakan Miskin Pendidikan Nasional	Pemeliharaan : Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100 %
6	106	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemeliharaan Tarakan Miskin Pendidikan Nasional	Pemeliharaan : Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100 %
7	107	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemeliharaan Tarakan Miskin Pendidikan Nasional	Pemeliharaan : Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100 %
8	108	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemeliharaan Tarakan Miskin Pendidikan Nasional	Pemeliharaan : Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100 %
9	109	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemeliharaan Tarakan Miskin Pendidikan Nasional	Pemeliharaan : Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100 %
10	110	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemeliharaan Tarakan Miskin Pendidikan Nasional	Pemeliharaan : Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100 %

No	Kode	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Capaian Kinerja dan Monev Pelaksanaan				Pencapaian		Pencapaian Target Tahun 2020		Berkas Bukti
				Target 2020	Capaian 2020	Label	Skor	Substansi	Skor	Target Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	
1	01	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	02	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	03	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	04	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	05	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	06	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	07	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	08	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	09	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	10	Program/Struktur Organisasi/Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	Indikator Kinerja (K) Program/Struktur Organisasi/Struktur Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 di atas.

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen RKPD Kabupaten Belitung tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung periode 2024-2026.

Penetapan kinerja tahunan ini merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) dinas yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Adapun beberapa program dan kegiatan yang belum terdapat dalam dokumen Renja 2025 dikarenakan penyesuaian dengan tema RKPD 2025 dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung serta rasionalisasi anggaran 2025 agar bisa diusulkan kembali melalui Renja Perubahan 2025 dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan.

Demikian Renja tahun 2025 ini disusun, sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2025.

Tanjungpandan, 31 Juli 2024

Kepala Dinas,


KASMIN, S.IP., MAB
Pembina Utama Muda
NIP. 196908241990031004

LAMPIRAN
RANCANGAN AKHIR RENJA DSITPA 2025 (SI PD)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ID	NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	PHONE	FAX	EMAIL	DOB	SEX	RACE	RELIGION	MARRIAGE	CHILDREN	PARENTS	SIBLINGS	EDUCATION	TRAINING	LICENSES	REMARKS	
1	John Doe	123 Main St	Anytown	CA	90210	555-123-4567	555-987-6543	john.doe@anytown.com	1980-01-15	M	W	C	N	2	1	1	1	High School	College	Trade School	University
2	Jane Smith	456 Elm St	Anytown	CA	90210	555-234-5678	555-876-5432	jane.smith@anytown.com	1985-03-22	F	W	C	N	1	1	1	1	High School	College	Trade School	University
3	Bob Johnson	789 Oak St	Anytown	CA	90210	555-345-6789	555-765-4321	bob.johnson@anytown.com	1975-07-10	M	W	C	N	3	2	2	2	High School	College	Trade School	University
4	Alice Brown	101 Pine St	Anytown	CA	90210	555-456-7890	555-654-3210	alice.brown@anytown.com	1965-11-05	F	W	C	N	1	1	1	1	High School	College	Trade School	University

[illegible]

[illegible]

No	Nama Lengkap Materi / Sub Materi / Judul	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Pembahasan Materi / Sub Materi / Judul										Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok
					Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	Materi Pokok Materi Pokok Materi Pokok	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Date	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)						Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)		
								Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)		Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	
															Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)	Jumlah (Mendapat penghargaan/kegiatan kompetensi)
1	2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5	2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
6	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
7	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
8	2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
9	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
10	2026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
11	2027	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
12	2028	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
13	2029	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
14	2030	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15	2031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
16	2032	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
17	2033	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
18	2034	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
19	2035	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
20	2036	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
21	2037	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
22	2038	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
23	2039	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
24	2040	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
25	2041	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
26	2042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
27	2043	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
28	2044	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
29	2045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
30	2046	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
31	2047	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
32	2048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
33	2049	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
34	2050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

